

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA



BERSIH
JERNIH
CANGGIH

INDONESIA TERKONEKSI

Semakin Digital, Semakin Maju



Laporan Tahunan

2020



INDONESIA TERKONEKSI **SEMAKIN DIGITAL, SEMAKIN MAJU**

Kementerian Kominfo telah melakukan pembangunan infrastruktur TIK secara konkret, tidak hanya di *ground segment* tetapi juga di *space-segment*. Penyediaan infrastruktur TIK merupakan upaya untuk meningkatkan integritas teritorial Indonesia, di mana infrastruktur TIK sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat dan bukan barang mewah lagi. Secara makro, dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka memperkuat konektivitas digital, Kementerian Kominfo akan mengakselerasi pembangunan infrastruktur TIK menjadi 10 tahun lebih cepat dari rencana awal yang semula akan tersedia tahun 2032.

Johnny G. Plate

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Besarnya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia disertai kejadian luar biasa, yakni Pandemi COVID-19 mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta seluruh elemen bangsa untuk terus beradaptasi dan bergerak maju mengiati pandemi COVID-19. Pandemi yang turut memengaruhi kebutuhan masyarakat akan teknologi memotivasi Kementerian Komunikasi dan Informatika agar berperan aktif dalam meningkatkan Konektivitas Telekomunikasi Nasional melalui upaya pembangunan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu, Laporan Tahunan Kementerian Kominfo pada Tahun 2020 mengusung tema:

**“INDONESIA TERKONEKSI,
SEMAKIN DIGITAL, SEMAKIN MAJU.”**

Pandemi ini turut memengaruhi berbagai rencana dan program di setiap Kementerian/ Lembaga, salah satunya dengan melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran, sehingga Kementerian Komunikasi dan Informatika memprioritaskan program dan penanganan di bidang fasilitas pelayanan kesehatan serta transformasi digital.

Tujuan utama dari transformasi digital, agar manfaat besar dari sektor TIK dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Transformasi digital harus menghasilkan internet yang lebih cepat, masyarakat yang lebih cakap digital, memperkecil disparitas digital di Indonesia dengan kinerja yang kolaboratif, reformatif, dan transformatif, serta menjamin keamanan infrastruktur di ruang digital.

Dalam upaya menjamin efektivitas dan keamanan infrastruktur ruang digital di Indonesia, dibutuhkan penciptaan ekosistem digital yang lebih produktif melalui penerbitan beberapa regulasi, serta didukung implementasi dan akselerasi transformasi digital dalam rangka meningkatkan *internet link ratio* di Indonesia.

Hingga saat ini, Kementerian Kominfo sedang dalam proses metamorfosis menjadi kementerian yang fokus pada bidang telekomunikasi dan digital dimana kedua hal tersebut sudah menjadi infrastruktur dasar. Reposisi juga dilakukan kepada kegiatan komunikasi publik namun dengan fokus yang bergeser kepada peran mengorkestrasikan dan menyusun *agenda setting*.

Mari, bersama kita menatap hari esok dengan tekad, semangat, dan memancang harapan baru akan Indonesia Digital, ***Indonesia Towards Digital Nations***. Dan bersama kita songong kebangkitan sektor telekomunikasi Indonesia dengan penuh optimisme, melaju pesat menjadi bangsa pemenang menuju bangsa digital yang gemilang dan penuh harapan.

Johnny G. Plate
*Menteri Komunikasi & Informatika
Republik Indonesia*



PRAKATA	3
DAFTAR ISI	4
DAFTAR GAMBAR	6
DAFTAR GRAFIK & TABEL	6
PROFIL PEJABAT KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	7
KILAS SETAHUN KOMINFO 2020	
A. Momentum Kominfo di 2020	12
B. Apresiasi Membangun di 2020	15
BAB I	
MENUJU TRANSFORMASI DIGITAL INDONESIA	
A. Peningkatan Konektivitas Digital Indonesia	
1. Internet untuk Negeri, Terkoneksi untuk Melayani	19
2. <i>Turn Digital On!</i> Digitalisasi Penyiaran	24
3. Siap-siap 5G	25
4. Menuju Satu Data Indonesia	27
B. Produktif di Ruang Digital	
1. Penyiapan Talenta Digital	29
2. Ruang Digital Aman, Nyaman	36
3. Lindungi Identitas Digital, RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP)	39
C. Komunikasi Publik yang Efektif	
1. Percepatan Diseminasi Informasi Program Prioritas Pemerintah	41
2. Penyampai Pesan Pemerintah Hingga Wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T)	42
D. Peran Strategis Kominfo dalam Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)	
1. Menghadirkan <i>Platform</i> Digital Penanganan COVID-19	44
2. Penyediaan Akses Internet di Garda Terdepan	45
3. Kontribusi Aktif Komunikasi Publik dalam Penanganan COVID-19 & PEN	46

BAB II RAPOR BIRU KEMENTERIAN KOMINFO

A. Realisasi Anggaran Kementerian Kominfo Tahun 2020	48
B. Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kementerian Kominfo Tahun 2020	49

BAB III LANGKAH STRATEGIS 2021: PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL INDONESIA

A. Akselerasi Digital Nasional	
1. Semakin Terkoneksi untuk Melayani	52
2. <i>Turn Digital On: Digital Television (DTV)</i>	54
3. Menuju 5G	55
4. Mewujudkan Satu Data Indonesia	58
5. RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP)	59
B. Menyiapkan Talenta Digital	
1. Digital Talent Scholarship (DTS) Tahun 2021	61
2. Gerak Cepat Literasi Digital	63
C. Langkah Strategis Penanganan Pandemi COVID-19	
1. Sistem Informasi Satu Data (SISD) Vaksinasi COVID-19	66
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan COVID-19 dan PEN	68



DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pemeliharaan BTS BAKTI (1)	18
Gambar 1.2	Pemeliharaan BTS BAKTI (2)	19
Gambar 1.3	Dokumentasi Kegiatan GNLD Siberkreasi Sepanjang Tahun 2020	30
Gambar 1.4	Kegiatan Pelatihan Intensif DTS 2020 (1)	31
Gambar 1.5	Kegiatan Pelatihan Intensif DTS 2020 (2)	32
Gambar 1.6	Silaturahmi Virtual Menteri Kominfo Ramadan 2020	40
Gambar 1.7	Webinar Vaksin: Tak Kenal Maka Tak Kebal - Forum Sosialisasi Penyuluh Informasi Publik (PIP)	41
Gambar 1.8	Aplikasi PeduliLindungi	44
Gambar 1.9	Layanan Penyediaan Akses Internet dari Kementerian Kominfo di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Rakumpit	45
Gambar 2.1	Rapat Kerja Kementerian Kominfo bersama Komisi I DPR RI	47
Gambar 3.1	Menteri Kominfo dalam Konferensi Pers Kedatangan Vaksin COVID-19	51
Gambar 3.2	BTS BAKTI	55
Gambar 3.3	Menteri Kominfo dalam Konferensi Pers “Isu Sektor Kominfo di RUU Omnibus Law Cipta Kerja	56
Gambar 3.4	Menteri Kominfo Meninjau Lokasi Lahan Pembangunan <i>Data Center</i> , Cikarang	58
Gambar 3.5	Lokasi Pembangunan <i>Data Center</i> , Cikarang	58
Gambar 3.6	Kegiatan Pelatihan Intensif DTS 2020 (3)	60
Gambar 3.7	Kegiatan Pelatihan Intensif DTS 2020 (4)	61
Gambar 3.8	Kegiatan Pelatihan Intensif DTS 2020 (5)	62
Gambar 3.9	Menteri Kominfo Membuka <i>Grand Launching</i> 4 Pilar Kurikulum & Modul Literasi Digital	64

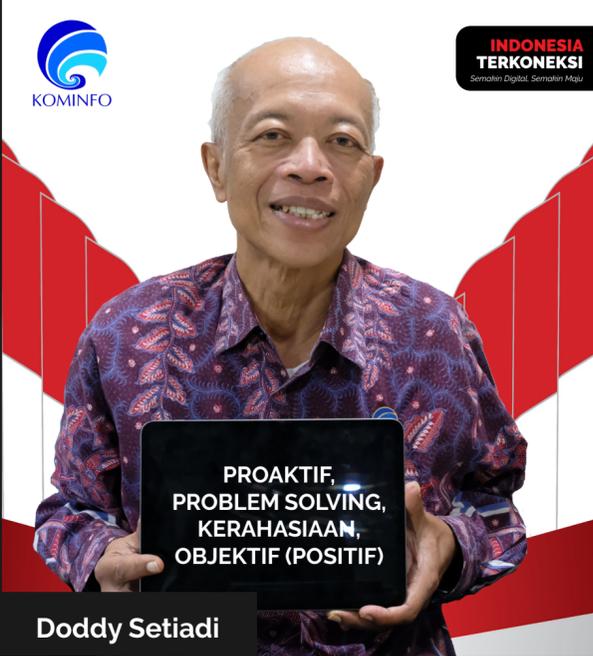
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Manfaat <i>Analog Switch-Off</i> (ASO)	24
Tabel 1.2	Kebijakan Penambahan dan Penataan Frekuensi	26
Tabel 1.3	Metode Pelatihan dan Total Peserta DTS 2020	31
Tabel 1.4	Jumlah Pemblokiran Konten Negatif di Tahun 2020	36
Tabel 1.5	Platform Digital Kementerian Kominfo untuk Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19.....	44

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Peta Sebaran BTS BAKTI per Desember 2020	21
Grafik 1.2	Sebaran Akses Internet di Fasilitas Publik per Desember 2020	22
Grafik 1.3	Arah Pengembangan 5G di Indonesia	25
Grafik 1.4	<i>Spectrum Demand</i> 5G (2014-2024)	25
Grafik 1.5	Kandidat Pita Frekuensi Baru untuk 5G	26
Grafik 1.6	Manfaat Pusat Data Nasional	27
Grafik 1.7	Jenis-jenis Pelatihan Penyiapan Talenta Digital Kementerian Kominfo	29
Grafik 1.8	Jenis-jenis Akademi dalam DTS	32
Grafik 1.9	Linimasa Program Kementerian Kominfo dalam Upaya Mendorong <i>Startup</i> Indonesia Naik Kelas	35
Grafik 1.10	Alur Pemblokiran Konten Negatif melalui AIS	36
Grafik 1.11	Statistik Penanganan Konten Internet Negatif pada Situs	37
Grafik 1.12	Statistik Penanganan Konten Internet Negatif pada Media Sosial	37
Grafik 1.13	Rangkuman Penanganan Hoaks Terkait COVID-19 dan Vaksin 2020	38
Grafik 2.1	Realisasi Anggaran Kementerian Kominfo Tahun 2020	48
Grafik 2.2	Alokasi Pagu Anggaran Belanja Kementerian Kominfo 2020	48
Grafik 2.3	Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kementerian Kominfo Tahun 2020	49
Grafik 3.1	Lima Langkah Akselerasi Transformasi Digital	50
Grafik 3.2	Data Perkembangan Pembangunan BTS dan Akses Internet 2020	52
Grafik 3.3	Linimasa Proyek SATRIA Tahun 2020-2023	53
Grafik 3.4	Sebaran Jangkauan Satelit SATRIA-1 di Fasilitas Publik	53
Grafik 3.5	<i>Roadmap</i> Menuju 5G	57
Grafik 3.6	Linimasa RUU PDP Tahun 2020-2021	59
Grafik 3.7	Empat Pilar Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi	63
Grafik 3.8	Sistem SISD Vaksinasi COVID-19 dan Peran Kementerian Kominfo	67
Grafik 3.9	Improvisasi Registrasi SISD Vaksinasi COVID-19	68
Grafik 3.10	Rencana Diseminasi Informasi Penting Terkait KPCPEN Tahun 2021	69

PROFIL PEJABAT KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

 <p>INDONESIA TERKONEKSI Semakin Digital, Semakin Maju</p> <p>INDONESIA TERKONEKSI SEMAKIN DIGITAL, SEMAKIN MAJU</p> <p>Johnny G. Plate</p>	 <p>INDONESIA TERKONEKSI Semakin Digital, Semakin Maju</p> <p>BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL</p> <p>Mira Tayyiba</p>	 <p>INDONESIA TERKONEKSI Semakin Digital, Semakin Maju</p> <p>PROAKTIF, PROBLEM SOLVING, KERAHASIAAN, OBJEKTIF (POSITIF)</p> <p>Doddy Setiadi</p>	 <p>INDONESIA TERKONEKSI Semakin Digital, Semakin Maju</p> <p>SIAP-SIAP 5G!</p> <p>Ismail</p>
 <p>INDONESIA TERKONEKSI Semakin Digital, Semakin Maju</p> <p>EKOSISTEM DIGITAL YANG PRODUKTIF</p> <p>Semuel Abrijani Pangerapan</p>	 <p>INDONESIA TERKONEKSI Semakin Digital, Semakin Maju</p> <p>AYO PINDAH KE TV DIGITAL!</p> <p>Ahmad M. Ramli</p>	 <p>INDONESIA TERKONEKSI Semakin Digital, Semakin Maju</p> <p>MENGEMBANGKAN TALENTA DIGITAL</p> <p>Hary Budianto</p>	 <p>INDONESIA TERKONEKSI Semakin Digital, Semakin Maju</p> <p>INTERNET UNTUK SEMUA ANAK NEGERI</p> <p>Anang Latif</p>

Mute Start Video Security Participants Chat Share Screen Record Reactions END



Johnny G. Plate

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia

Johnny G. Plate saat ini menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Pada tanggal 23 Oktober 2019, beliau dilantik menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika sebagai bagian dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo.

Sebelumnya, Menteri Johnny memulai bisnis pada awal tahun 1980-an. Selanjutnya, Bersama koleganya, lulusan S1 Universitas Katolik Atma Jaya ini mengembangkan bisnis ke dunia transportasi penerbangan dengan mengambil bagian sebagai Komisaris di Air Asia.

Sebelum ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika pada Kabinet Indonesia Maju, pada tahun 2014-2019, beliau dipercaya sebagai anggota DPR RI yang duduk di Komisi XI.



Mira Tayyiba, S.T., MSEE.

Sekretaris Jenderal dan Plt. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP)



**Doddy Setiadi,
Ak., MM., CA., CPA., QIA**

Inspektur Jenderal



Dr. Ir. Ismail, M.T.

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI)



**Prof. Dr. Ahmad M. Ramli,
SH, MH, FCBARB**

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI)



Samuel Abrijani Pangerapan, B.Sc

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika)



Dr. Hary Budiarto M.Kom

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BLSDM)



Ir. Anang Latif, ST. M.Sc.

Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)



Prof. Dr. Drs. Henri Subiakto, SH. MA
Staf Ahli Menteri Bidang Hukum



Prof. Dr. Widodo Muktiyo
*Staf Ahli Menteri Bidang
Komunikasi dan Media Massa*



Zulfan Lindan
Staf Khusus Menteri



J. H. Philip M. Gobang
Staf Khusus Menteri



Dedy Permadi, S. IP., M.A., PH.D.
*Staf Khusus Menteri Bidang
Digital dan SDM*



Dra. Rosarita Niken Widiastuti, M.Si
*Staf Khusus Menteri Bidang IKP dan
Hubungan Antar Lembaga*

KILAS SETAHUN

A

Momentum
Kominfo
di 2020

B

Apresiasi
Membangun
di 2020



A

MOMENTUM KOMINFO DI 2020



- ✓ Kementerian Kominfo bangun infrastruktur telekomunikasi di lima destinasi wisata prioritas untuk **meningkatkan kualitas pariwisata di Indonesia**.

- ✓ Menkominfo Johnny G. Plate menyerahkan RUU Pelindungan Data Pribadi (PDP) kepada Presiden Jokowi demi menjamin keamanan kepemilikan data pribadi.

- ✓ Menkominfo memaparkan proyeksi ekonomi digital Indonesia di Washington, Amerika Serikat.
- ✓ Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, dan seluruh operator seluler **berkomitmen untuk mencegah peredaran perangkat telekomunikasi ilegal** yang merugikan masyarakat, industri, operator, dan negara melalui pengendalian IMEI.

- ✓ Kementerian Kominfo menyiapkan Digital Talent Scholarship, Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi, dan Digital Technopreneur secara daring agar masyarakat bisa tetap aktif dan tereduksi meski #DiRumahAja di tengah pandemi COVID-19.

- ✓ Menkominfo mengeluarkan keputusan terkait *tracing* dan *tracking* COVID-19 yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kominfo Nomor 159 Tahun 2020 mengenai Upaya Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Melalui Dukungan Sektor Pos dan Informatika.

- ✓ Kementerian Kominfo meluncurkan aplikasi PeduliLindungi untuk dapat melacak penyebaran virus COVID-19.



MEI

- ✓ Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap virus COVID-19, Kementerian Kominfo meluncurkan 1.000 mesin pintar Akses untuk bangsa yang berbasis *Internet of Things* (IoT). Mesin ini tersebar di sejumlah kota, seperti Jabodetabek, Sidoarjo, dan Bali.

JUNI

- ✓ Tercatat lebih dari 11 ribu desa/kelurahan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) telah memiliki jaringan 4G yang dibangun oleh Kominfo bersama operator seluler.
- ✓ Kementerian Kominfo, Kementerian BUMN, dan Telkom Indonesia menambahkan beberapa fitur untuk memudahkan pengguna Aplikasi PeduliLindungi dalam menghadapi *new normal* atau kenormalan baru.
- ✓ Untuk mendorong ekosistem ekonomi digital, termasuk perkembangan UMKM di masa pandemi COVID-19, Kementerian Kominfo berusaha untuk mengakselerasi dunia digital dengan cara komprehensif.

JULI

- ✓ Kementerian Kominfo mempererat kerja sama dalam bidang investasi infrastruktur TIK dengan Qatar.
- ✓ Menkominfo menyerukan kedaulatan dan keamanan data dalam Pertemuan Tingkat Menteri (*Ministerial Meeting*) dalam agenda puncak G20 Digital Economy Task Force.
- ✓ Pemerintah RI dalam hal ini Kementerian Kominfo dan Pemerintah Perancis membahas tiga kerja sama dalam percepatan transformasi digital.

AGUSTUS

- ✓ Kementerian Kominfo menjalin kerja sama dengan Pemerintah AS untuk mempererat kerja sama di bidang infrastruktur, telekomunikasi, talenta digital, dan perlindungan data pribadi.
- ✓ Menteri Kominfo mendorong pengembangan solusi kesehatan dengan pemanfaatan teknologi di tengah pandemi COVID-19, seperti layanan telemedis. Keberadaan layanan kesehatan jarak jauh ini memungkinkan pasien dan tenaga kesehatan berdiskusi tanpa harus bertatap muka.



B

APRESIASI MEMBANGUN



(26/02/2020)

Kementerian Kominfo menerima penghargaan Hasil Pengawasan Kearsipan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2019 dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).



(07/09/2020)

Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi menjadi pemenang dalam kontes World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2020.



(06/11/2020)

BAKTI Kominfo merebut penghargaan tahunan Better Satellite World Awards ke-6.



(26/11/2020)

Kementerian Kominfo kembali merebut penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Tahun 2020.



(21/12/2020)

Kementerian Kominfo memperoleh penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).



(23/12/2020)

Kementerian Kominfo meraih tiga penghargaan TOP DIGITAL AWARDS 2020 yaitu:

1. TOP DIGITAL Implementation 2020 on Ministry # Level Stars 4
2. TOP DIGITAL Transformation Readiness 2020
3. TOP Leader on Digital Implementation 2020



(01/04/2021)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 118/KMK.02/2021 tentang Penetapan Kementerian negara/Lembaga yang diberikan Penghargaan atas Kinerja Anggaran kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2020, Kominfo masuk ke dalam kategori Pagu Sedang dan berada pada peringkat ke 7 dari 16 Kementerian Negara/Lembaga sebesar 95,22 pada Tahun Anggaran 2020.

BAB I

MENUJU TRANSFORMASI DIGITAL INDONESIA

A

Peningkatan
Konektivitas
Digital Indonesia

B

Produktif
di Ruang
Digital

C

Komunikasi
Publik yang
Efektif

D

Peran Strategis Kominfo
dalam Penanganan
COVID-19 dan PEN





PENINGKATAN KONEKTIVITAS DIGITAL INDONESIA



Gambar 1.1: Pemeliharaan BTS BAKTI (1)

Mengubah krisis pandemi menjadi lompatan besar dalam mengubah ekosistem digital dengan membangun infrastruktur digital yang kuat dan inklusif.



INTERNET UNTUK NEGERI TERKONEKSI UNTUK MELAYANI

Lebih luas dari sekadar mengatasi kesenjangan digital, penyedia layanan internet di fasilitas publik diharapkan dapat membuka akses, meningkatkan kemampuan adaptif penggunaan TIK dan pemberdayaan *e-literacy*, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sementara penyediaan layanan internet di kantor pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menghilangkan kesenjangan informasi antara perdesaan dan perkotaan.

***Base Transceiver
Station (BTS)***

**Akses Internet di
Fasilitas Publik**

Gambar 1.2: Pemeliharaan BTS BAKTI (2)

BASE TRANSCEIVER STATION (BTS)

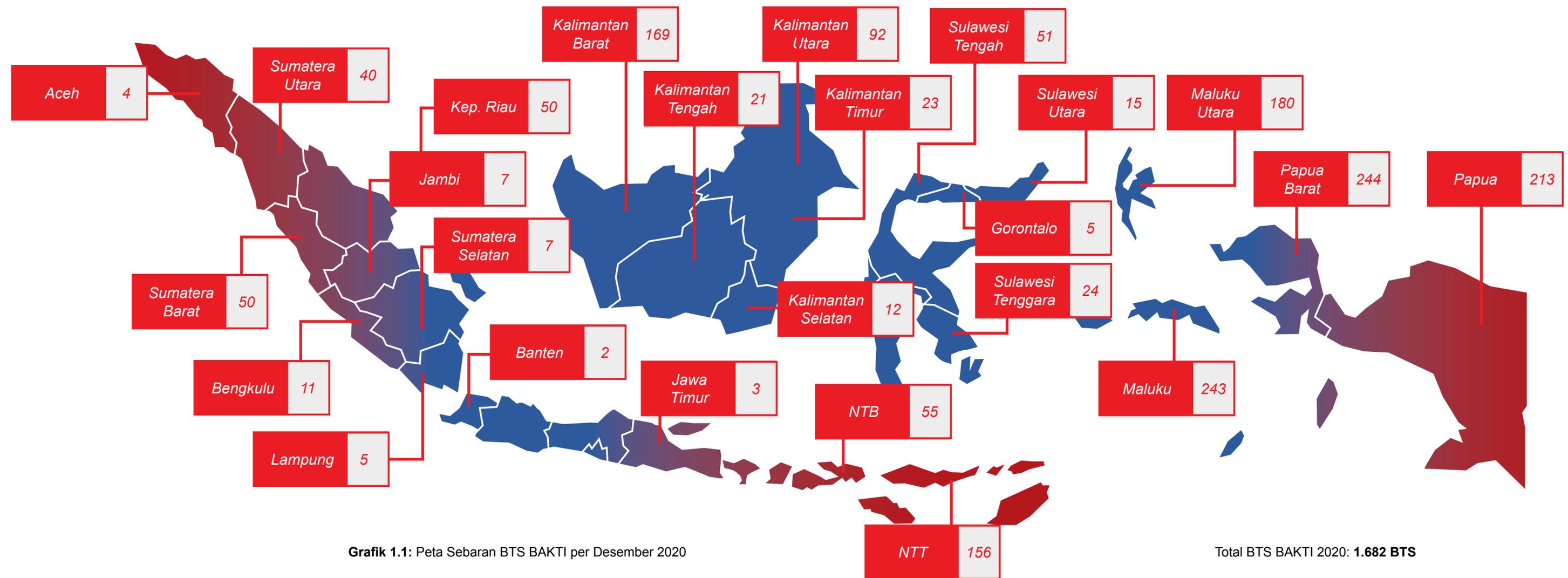
Sampai dengan Desember 2020, Kementerian Kominfo telah membangun BTS di 1.682 desa/ kelurahan dan akan dibangun lebih banyak lagi pada tahun-tahun berikutnya.

1.682

Desa/Kelurahan

Ribuan BTS ini tersebar di berbagai daerah yang belum terlayani aktivitas telekomunikasi seluler, khususnya di lokasi prioritas, terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) yang merupakan bagian dari total lebih dari 550.00 BTS yang tersebar di Indonesia.

PETA SEBARAN BTS PER 2020



Grafik 1.1: Peta Sebaran BTS BAKTI per Desember 2020

Total BTS BAKTI 2020: 1.682 BTS

AKSES INTERNET DI FASILITAS PUBLIK

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kominfo hadir untuk mengatasi kesenjangan digital dengan melakukan penyediaan layanan internet khususnya di daerah yang belum terjangkau. Untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan tersebut, Kementerian Kominfo melakukan kerjasama dengan prinsip sinergitas dan partisipasi secara *bottom up* yang merupakan usulan dari Pemda/Kementerian/Lembaga/Instansi terkait sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kewajiban Pelayanan Universal.

Lokasi yang mendapatkan penyediaan layanan internet terdiri dari kantor pemerintahan, lokasi publik, lokasi wisata, pelayanan kesehatan, pelayanan usaha, pendidikan, pertahanan dan keamanan, Pusat Kegiatan Masyarakat, dan tempat ibadah, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain membuka akses, meningkatkan kemampuan adaptif penggunaan TIK bagi masyarakat, mengurangi kesenjangan digital, meningkatkan pemberdayaan e-literasi masyarakat, serta turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sementara itu, penyediaan layanan internet di kantor pemerintahan, lokasi publik, pelayanan kesehatan seperti puskesmas, Balai Latihan Kerja, serta balai desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, hingga nantinya tidak ada lagi kesenjangan akses informasi antara perdesaan dan perkotaan.

Sampai dengan Desember 2020, layanan internet telah *on air* di 11.817 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan rincian sebagai berikut:



Grafik 1.2: Sebaran Akses Internet di Fasilitas Publik per Desember 2020

Dukung Migrasi **TV Digital Indonesia**

BERSIH GAMBARNYA

JERNIH SUARANYA

CANGGIH TEKNOLOGINYA



**BERSIH
JERNIH
CANGGIH**



Turn Digital On!

DIGITALISASI PENYIARAN

Digitalisasi televisi dari siaran analog menjadi siaran digital atau *Analog Switch-Off (ASO)* adalah sebuah keharusan dalam upaya percepatan transformasi digital Indonesia.

Migrasi ke TV digital bukan tanpa alasan.

Setidaknya ada dua alasan mengapa TV analog harus segera dihentikan, yakni:

- ✓ Industri penyiaran kita selama ini menanggung biaya yang sangat besar untuk melakukan sewa frekuensi analog.
- ✓ Frekuensi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menyediakan layanan lain, seperti layanan internet cepat pun menjadi terhambat.

Dengan kebijakan ini, pemanfaatan spektrum frekuensi akan semakin efisien, daya saing industri penyiaran akan meningkat, serta tingkat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga akan semakin optimal.



ASO ditargetkan selambat-lambatnya terlaksana pada **2 November 2022** berdasarkan UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

MANFAAT ANALOG SWITCH-OFF (ASO)		
MASYARAKAT	INDUSTRI PENYIARAN	PEMERINTAH
Mendapatkan kualitas gambar dan suara lebih jernih dan interaktif.	Penyesuaian pola bisnis di era digital.	Efisiensi pemanfaatan spektrum frekuensi.
Pilihan program siaran lebih beragam dan berteknologi canggih.	Menekan inefisiensi secara signifikan, terutama dalam biaya sewa frekuensi analog.	Peningkatan daya saing industri penyiaran.
Pemerataan siaran televisi berkualitas di seluruh Nusantara.	Kualitas siaran tidak rentan dengan cuaca buruk.	Optimalisasi peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Kualitas siaran tidak rentan dengan cuaca buruk.		Menghilangkan interferensi radio frekuensi ke negara tetangga.

Tabel 1.1: Manfaat Analog Switch-Off (ASO)

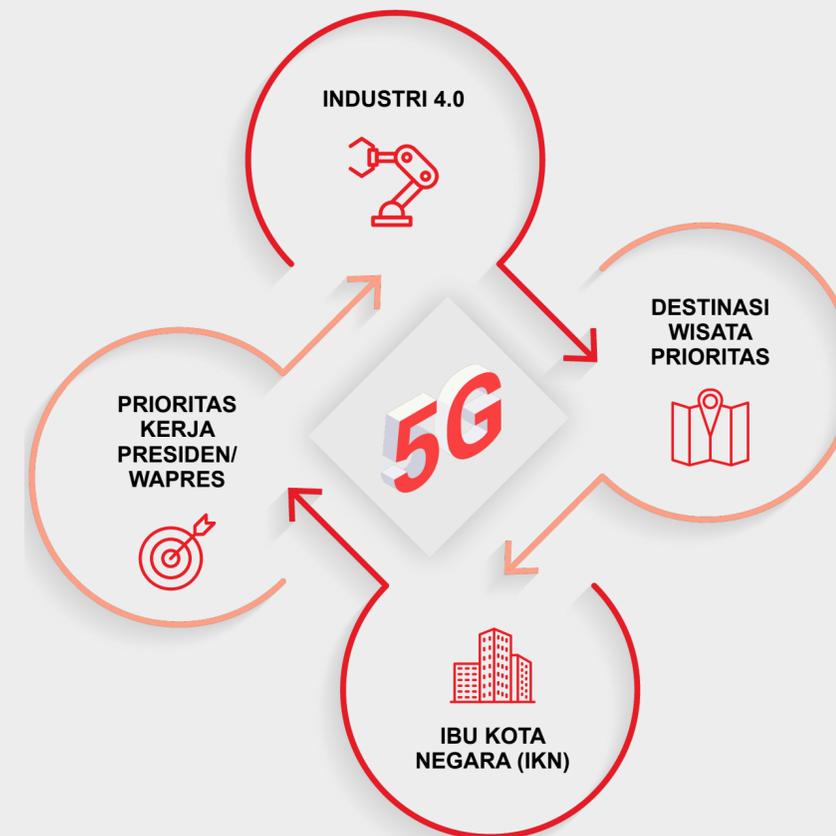
SIAP-SIAP 5G

PERSIAPAN DAN IMPLEMENTASI 5G NASIONAL

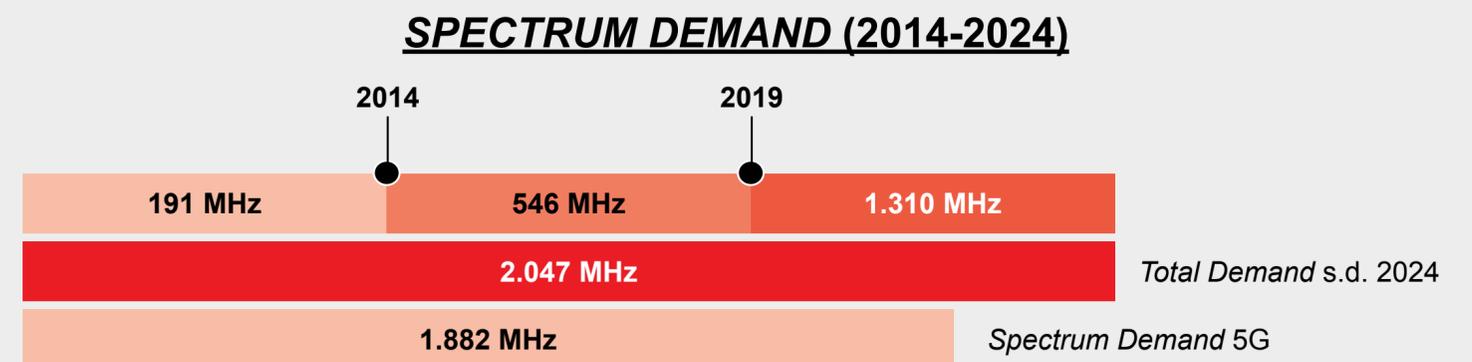
Bersamaan dengan upaya peningkatan cakupan layanan 4G ke seluruh desa, Kementerian Kominfo juga sedang mempersiapkan teknologi seluler konektivitas *next generation* (5G) di Indonesia. Rencana implelementasi 5G tersebut tentu harus didukung dengan infrastruktur jaringan *broadband* yang memadai. Dalam rangka persiapan implementasi 5G secara nasional, akan dilakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun *roadmap* 5G
2. Menyediakan alokasi frekuensi sesuai pita-pita kebutuhan 5G
3. Menyiapkan regulasi dan kebijakan penyelenggaraan 5G
4. Pengembangan ekosistem dan perangkat TIK pendukung implementasi 5G dan percepatan pemanfaatan 5G
5. Fasilitasi dan pendampingan penggelaran infrastruktur dan jaringan 5G di 6 Ibukota Provinsi di Pulau Jawa, 5 Destinasi Wisata Super Prioritas, Ibu Kota Negara (IKN) dan 1 Industri Manufaktur pada tahap awal implementasi 5G

ARAH PENGEMBANGAN 5G DI INDONESIA

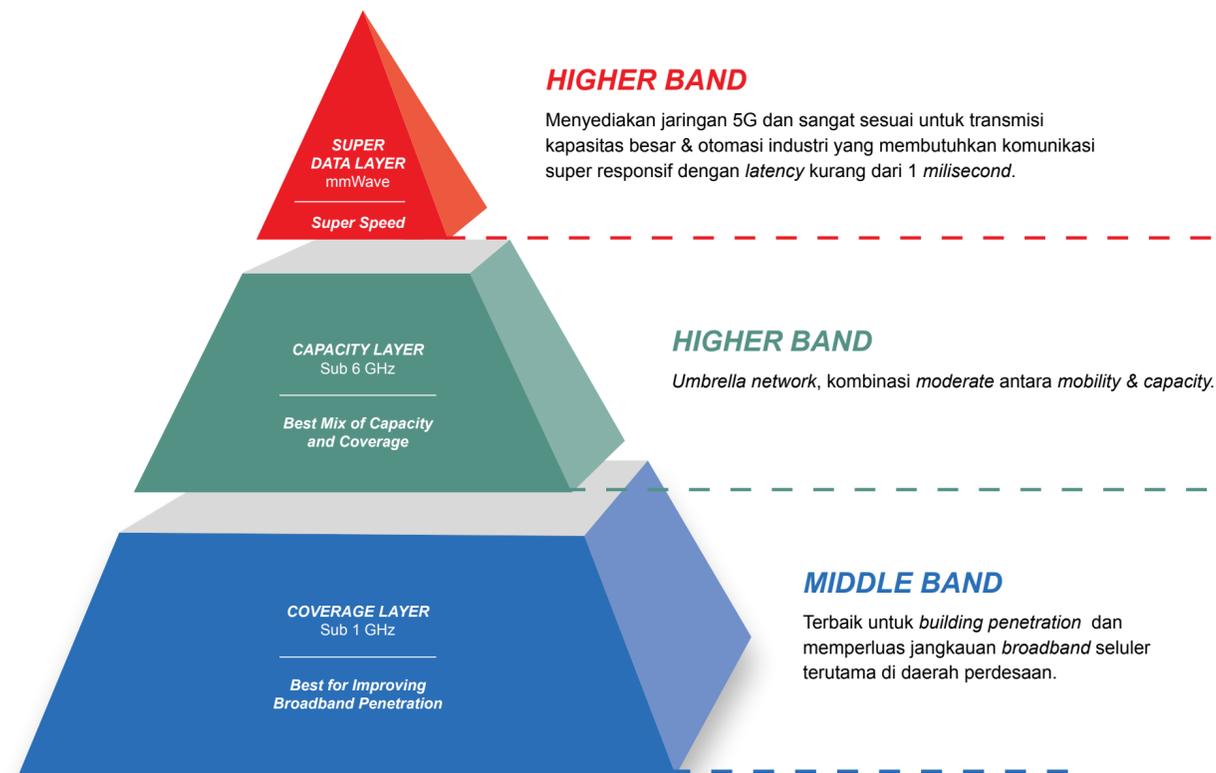


Grafik 1.3: Arah Pengembangan 5G di Indonesia



Grafik 1.4: Spectrum Demand 5G (2014-2024)

FARMING & REFARMING SPEKTRUM FREKUENSI



Grafik 1.5: Kandidat Pita Frekuensi Baru untuk 5G

Kementerian Kominfo terus melakukan upaya *farming & refarming* untuk menambah ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk implementasi teknologi baru pita lebar selular (*mobile broadband*), khususnya 5G.

Untuk dapat mengimbangi pertumbuhan *traffic* data, khususnya dalam menyongsong era 5G, Indonesia membutuhkan total *bandwidth* sebesar 1.882 MHz pada 2024 (berdasarkan kajian ilmiah ITB 2018). Hingga akhir 2019, capaian spektrum frekuensi radio untuk keperluan *mobile broadband* sebesar 737 MHz. Kemudian di akhir 2020, terdapat penambahan 30 MHz spektrum frekuensi radio.

Kementerian Kominfo menargetkan minimal penambahan spektrum frekuensi radio sebesar 1.310 MHz yang harus dicapai secara bertahap dalam periode tahun 2020-2024 dengan akumulasi *bandwidth* pada akhir 2024 mencapai 2.047 MHz.

KEBIJAKAN PENAMBAHAN & PENATAAN FREKUENSI

TEKNOLOGI NETRAL (2G/3G/4G/5G)

Kementerian Kominfo menerapkan kebijakan netral teknologi yang memberikan kebebasan bagi operator menggunakan frekuensi untuk teknologi 2G, 3G, atau 4G sesuai dengan kebutuhan wilayah. Termasuk jika nantinya akan dikembangkan menjadi teknologi 5G.

FREKUENSI IZIN KELAS (WIFI & IoT)

Kementerian Kominfo telah memberikan tambahan alokasi frekuensi izin kelas yang bisa dimanfaatkan operator untuk meningkatkan kapasitas dengan teknologi *Licensed Assisted Access*. Kementerian Kominfo juga menetapkan tambahan alokasi frekuensi izin kelas untuk WiFi dan IoT agar memberi ruang inovasi tanpa harus mengurus Izin Stasiun Radio (ISR).

REFARMING FREKUENSI

Kementerian Kominfo telah melakukan dua kali *refarming* frekuensi untuk meningkatkan kualitas layanan 4G LTE di Indonesia.

Tabel 1.2: Kebijakan Penambahan dan Penataan Frekuensi

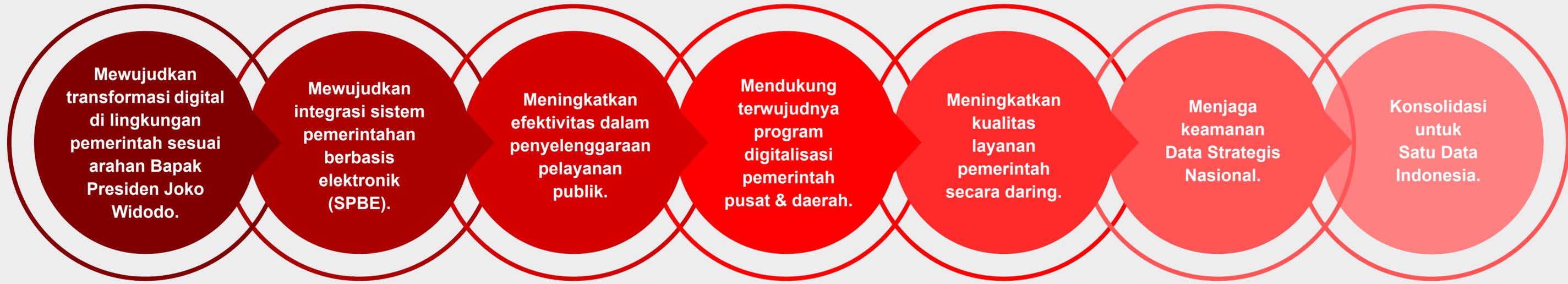
MENUJU SATU DATA INDONESIA

Pusat Data Nasional (PDN) akan dibangun di lahan seluas 49.491 m² di Greenland International Industrial Center (GIIC), Deltamas, Cikarang, Kabupaten Bekasi, serta di Batam, Kepulauan Riau. Kedua PDN tersebut memiliki kapasitas penyimpanan sebesar 72 petabytes.

72 Petabytes

Kehadiran Pusat Data Nasional akan menghasilkan efisiensi dalam pengadaan server, ruang *data center*, dan aplikasi umum sejenis pada kementerian/lembaga.

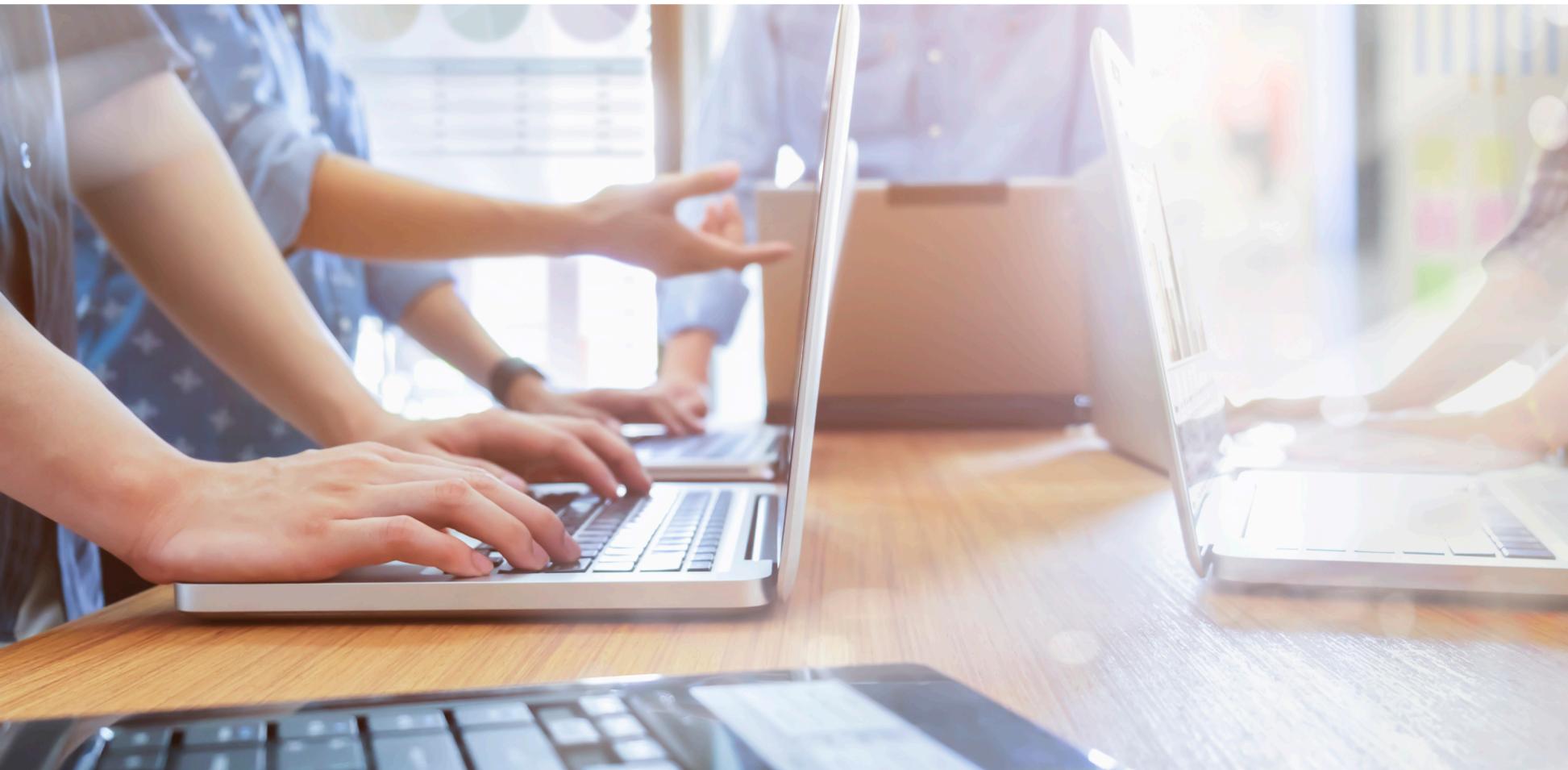
Mengapa **Butuh** Pusat Data **Nasional**?



Grafik 1.6: Manfaat Pusat Data Nasional

B

PRODUKTIF DI RUANG DIGITAL



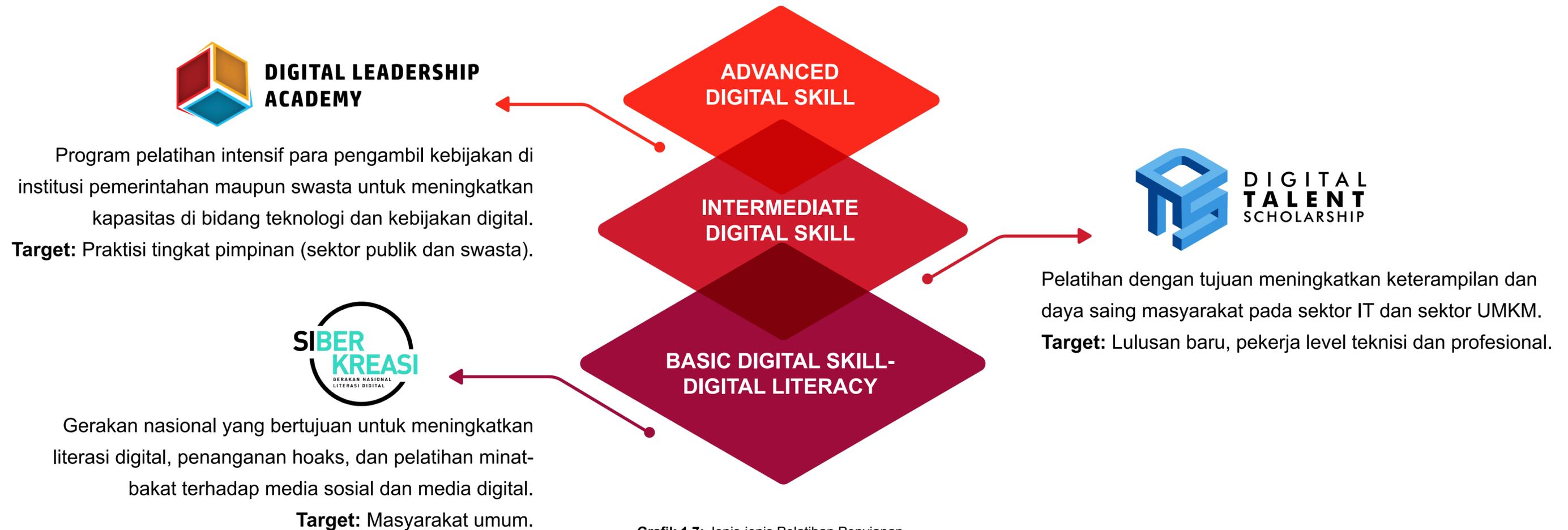
Masyarakat sebagai individu harus mendapatkan literasi yang memadai untuk mau adopsi teknologi, menggunakan teknologi digital untuk kehidupan sehari-hari, memanfaatkan teknologi untuk pendapatan, dan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Dalam tatanan pertumbuhan industri di era digital, masyarakat sebagai individu juga harus dapat menyesuaikan kemampuan dan kompetensi diri, agar dapat terserap pada industri yang membutuhkan.

PENYIAPAN TALENTA DIGITAL

Demi mendukung transformasi digital Indonesia, dibutuhkan 9 juta orang talenta digital selama 15 tahun. Hal ini setara dengan rerata 600ribu orang per tahun.

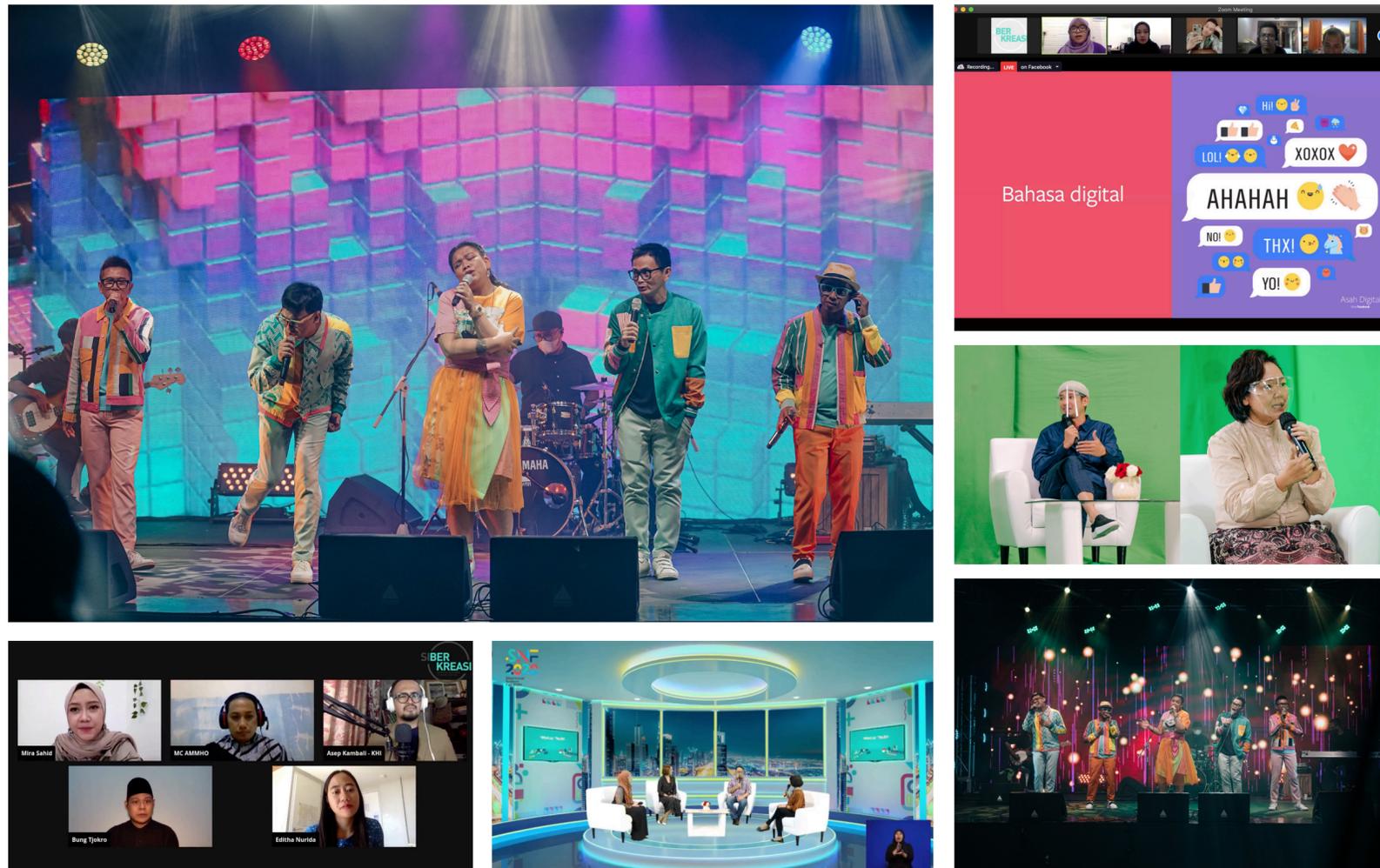
Untuk membentuk dan menyiapkan talenta digital tersebut, Kementerian Kominfo menyediakan pelatihan yang terdiri dari level *basic*, *intermediate*, dan *advance*.



Grafik 1.7: Jenis-jenis Pelatihan Penyiapan Talenta Digital Kementerian Kominfo

Penyiapan Talenta Digital

SIBERKREASI PERCEPAT LITERASI DIGITAL



Gambar 1.3: Dokumentasi Kegiatan GNLD Siberkreasi Sepanjang Tahun 2020

Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi menjadi langkah Kementerian Kominfo untuk mempercepat literasi digital di Tanah Air. Kegiatan ini berfungsi sebagai wadah kolaborasi, koordinasi, dan sinergi kerja bersama pemangku kepentingan majemuk untuk menggiatkan advokasi dan edukasi literasi digital secara komprehensif dan berkelanjutan. Pada 2020, Program Literasi Digital menargetkan 205.000 orang terliterasi di bidang TIK. Melebihi target yang ditetapkan, di akhir 2020, tercatat 213.143 orang terliterasi di bidang TIK melalui 642 kegiatan daring.

Tidak hanya melampaui target, GNLD Siberkreasi menjadi pemenang dalam kontes *World Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2020*. GNLD Siberkreasi dinobatkan sebagai *Winner* dari *Action Lines WSIS C4 Capacity Building* yang terkait dengan pemenuhan tujuan *SDGs Goal 4: Quality Education*.

Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama para pegiat literasi digital di bawah koordinasi GNLD Siberkreasi telah Menyusun Peta Jalan Literasi Digital Nasional. Penyusunan Peta Jalan ini dilakukan melalui serangkaian Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) dari bulan September-November 2020 yang diikuti oleh jejaring pegiat literasi digital lintas institusi/komunitas. Penyusunan tersebut membuahkan acuan dalam pelaksanaan kegiatan literasi digital yang dapat dibagi menjadi beberapa kegiatan sebagai berikut: (1) penyusunan modul & kurikulum literasi digital; (2) kegiatan *rebranding* program literasi digital nasional; (3) pelaksanaan program literasi digital nasional di 514 kabupaten/kota di 34 provinsi.

Penyiapan Talenta Digital

DIGITAL TALENT SCHOLARSHIP, MENUJU *DIGITAL SOCIETY*

Digital Talent Scholarship (DTS) merupakan program beasiswa pelatihan intensif yang bertujuan meningkatkan keterampilan dan daya saing sumber daya manusia (SDM) bidang teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari program pembangunan prioritas nasional.

Lebih jauh lagi, program ini bertujuan mengurangi kesenjangan kemampuan digital di Indonesia sehingga pasokan keterampilan permintaan industri tidak hanya terpusat di kota-kota besar dan wilayah Indonesia bagian Barat.

Selain itu, kolaborasi antara perekrut/perusahaan yang membutuhkan keterampilan, penyedia jasa pendidikan, pembuat kebijakan, dan masyarakat, juga perlu dijalin lebih erat untuk menjembatani antara kebutuhan dan permintaan.

Metode Pelatihan dan sertifikasi DTS

94%
Daring

6%
Luring

Total Peserta Selama 2020

58.116

Terdiri atas lulusan baru (*fresh graduate*), masyarakat umum, dan pegawai negara selama 2020.

Tabel 1.3: Metode Pelatihan dan Total Peserta DTS 2020



Gambar 1.4: Kegiatan Pelatihan Intensif DTS 2020 (1)

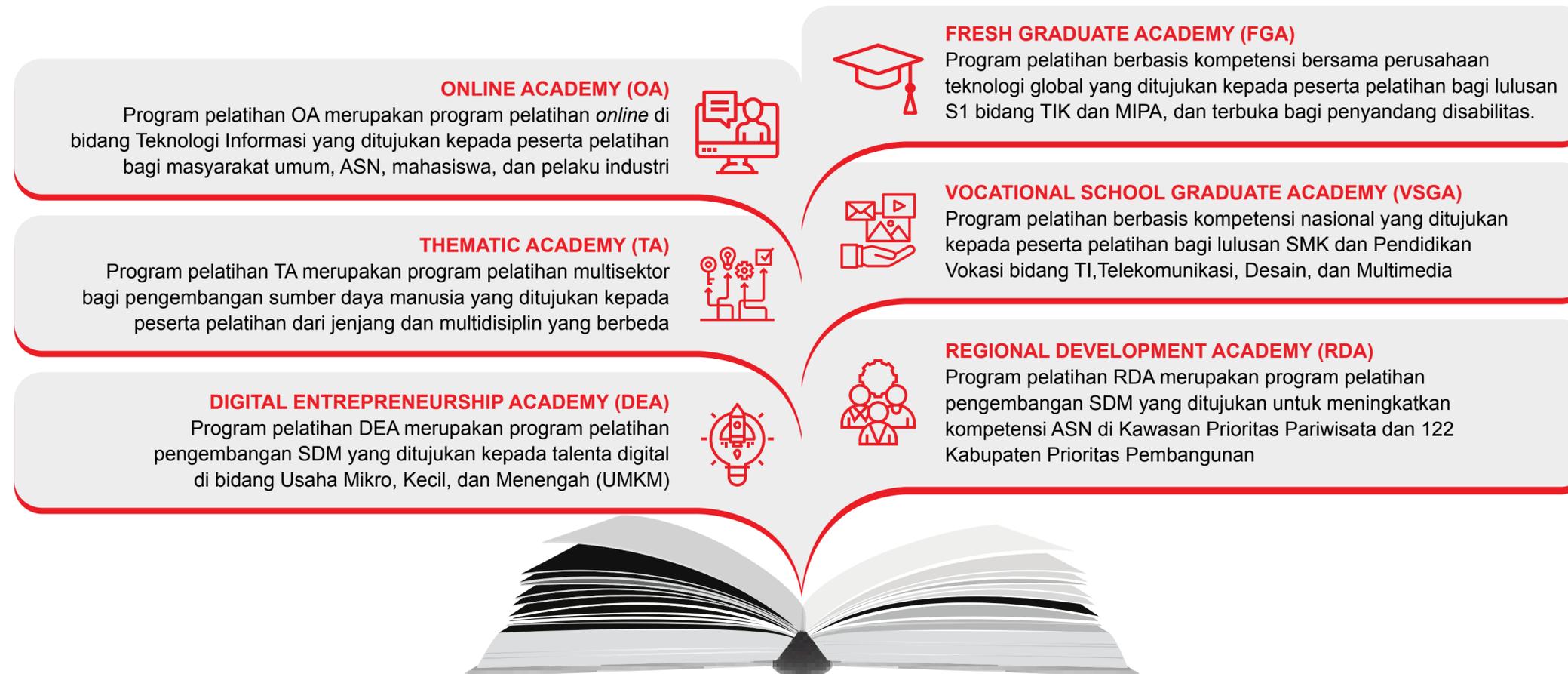
Penyiapan Talenta Digital

Digital Talent Scholarship, Menuju *Digital Society*

PENGEMBANGAN SDM/TALENTA BIDANG DIGITAL



Gambar 1.5: Kegiatan Pelatihan Intensif DTS 2020 (2)



Grafik 1.8: Jenis-jenis Akademi dalam DTS

1

FRESH GRADUATE ACADEMY (FGA)

- ✓ CCNA Network Engineer
- ✓ CCNA Cyberoperation Specialist
- ✓ Cloud Computing
- ✓ Core System Administration
- ✓ Java Programming
- ✓ Database Design and Programming with SQL
- ✓ Data Science.

2

VOCATIONAL SCHOOL GRADUATE ACADEMY (VSGA)

- ✓ Network Administrator
- ✓ Mobile Programmer
- ✓ Web Developer
- ✓ Graphic Designer
- ✓ Motion Graphic Artist
- ✓ Multimedia Designer
- ✓ Drive Tester

3

THEMATIC ACADEMY (TA)

- ✓ Digital Marketing
- ✓ IT Project Management
- ✓ Big Data (for social science)
- ✓ IT Perbankan
- ✓ IT untuk eks Buruh Migran

4

REGIONAL DEVELOPMENT ACADEMY (RDA)

- ✓ Analisis Media Sosial
- ✓ Big Data Analytics
- ✓ Junior Graphic Designer
- ✓ Junior Network Administrator
- ✓ Smart City

5

ONLINE ACADEMY (OA)

- ✓ OpenStack Administrator
- ✓ Containers, Kubernetes, OpenShift
- ✓ IT Essentials
- ✓ CCNA Network Engineer
- ✓ CCNA Cyber Operations Specialist
- ✓ Python
- ✓ Programming: HTML, CSS, Javascript
- ✓ Android Developer
- ✓ iOS Developer- Augmented Reality
- ✓ Associate Cloud Engineer
- ✓ Digital Skills

6

DIGITAL ENTREPRENEURSHIP ACADEMY (DEA)

- ✓ Digital Entrepreneurship Kelas Umum (Google)
- ✓ Digital Entrepreneurship Kelas IRT (Google)
- ✓ Digital Entrepreneurship Facebook
- ✓ Digital Entrepreneurship Kelas Umum (Gojek)
- ✓ Digital Entrepreneurship Kelas Kuliner (Gojek)
- ✓ Digital Entrepreneurship (Tokopedia)

Digital Talent Scholarship, Menuju *Digital Society*

TEMA-TEMA PELATIHAN DALAM AKADEMI

Tiap-tiap akademi dalam Digital Talent Scholarship memiliki beberapa tema pelatihan yang dapat dipilih oleh peserta sesuai kebutuhan mereka.

MENDORONG *STARTUP* DIGITAL NAIK KELAS

Kementerian Kominfo menyediakan akses, mentoring dan *networking* bagi para pegiat *startup* digital nasional dalam rangka mendorong kehadiran *startup* digital menjadi salah satu kontribusi penting untuk menjadi pemenang di dalam ekonomi digital. Keberadaan sektor hilir ekonomi digital akan melengkapi upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

“Ketersediaan talenta digital menjadi kunci bagi perkembangan industri *startup* digital di Indonesia, di samping ketersediaan akses pendanaan.”

Johnny G. Plate

Dalam acara The Milestone Day Startup Studio Indonesia (26/11/2020)



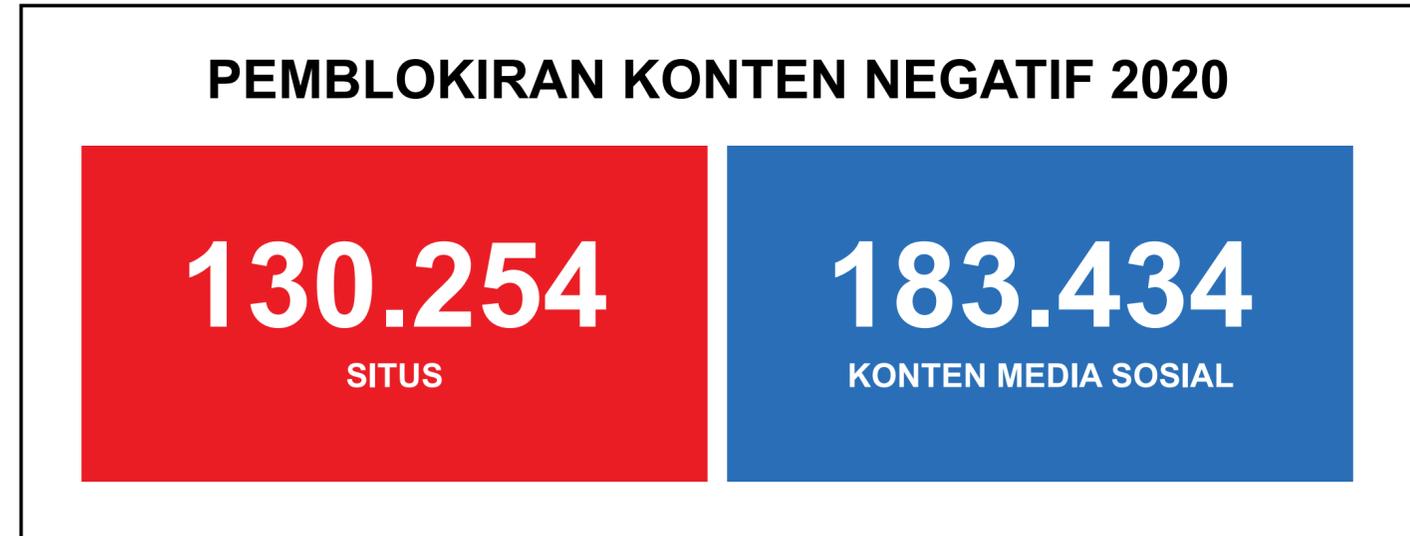
MENDORONG *STARTUP* DIGITAL NAIK KELAS



Grafik 1.9: Linimasa program Kementerian Kominfo dalam upaya mendorong *Startup* Indonesia naik kelas

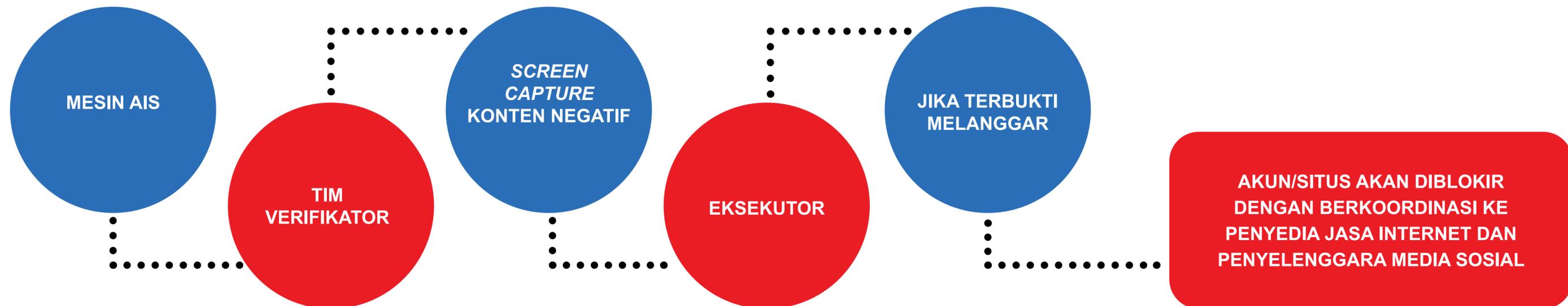
RUANG DIGITAL AMAN NYAMAN

Mulai resmi difungsikan Kementerian Kominfo pada 3 Januari 2018, Mesin AIS, mesin pengais konten negatif yang mendeteksi konten negatif di ruang digital yang bertujuan membuat ruang digital lebih bersahabat, aman dan nyaman. Mesin AIS dilengkapi dengan *Artificial Intelligence* untuk mencari konten negatif berdasarkan metode *keyword based search*.



Tabel 1.4: Jumlah Pemblokiran Konten Negatif di Tahun 2020

ALUR PEMBLOKIRAN KONTEN NEGATIF



Grafik 1.10: Alur Pemblokiran Konten Negatif melalui AIS

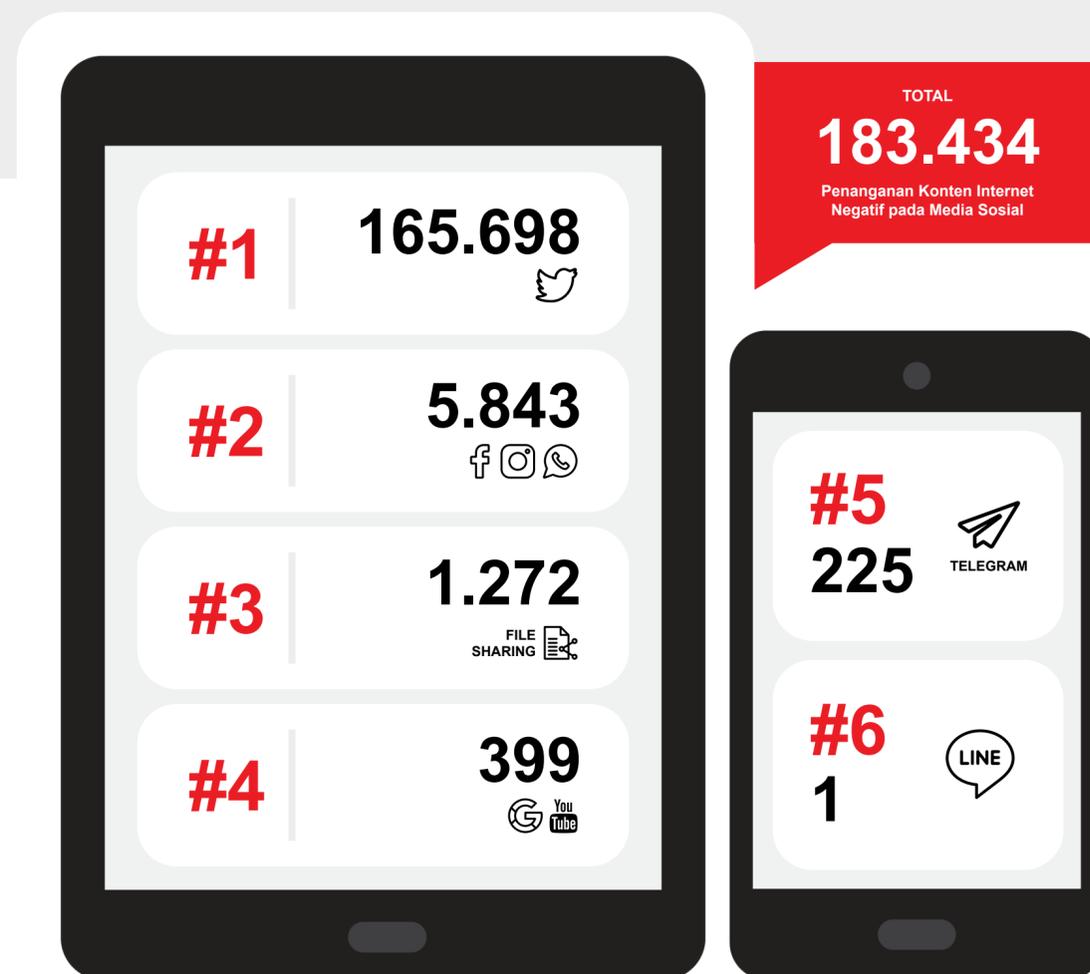
STATISTIK PENANGANAN KONTEN INTERNET NEGATIF PADA SITUS



Grafik 1.11: Statistik Penanganan Konten Internet Negatif pada Situs

Sumber: Ditjen APTIKA

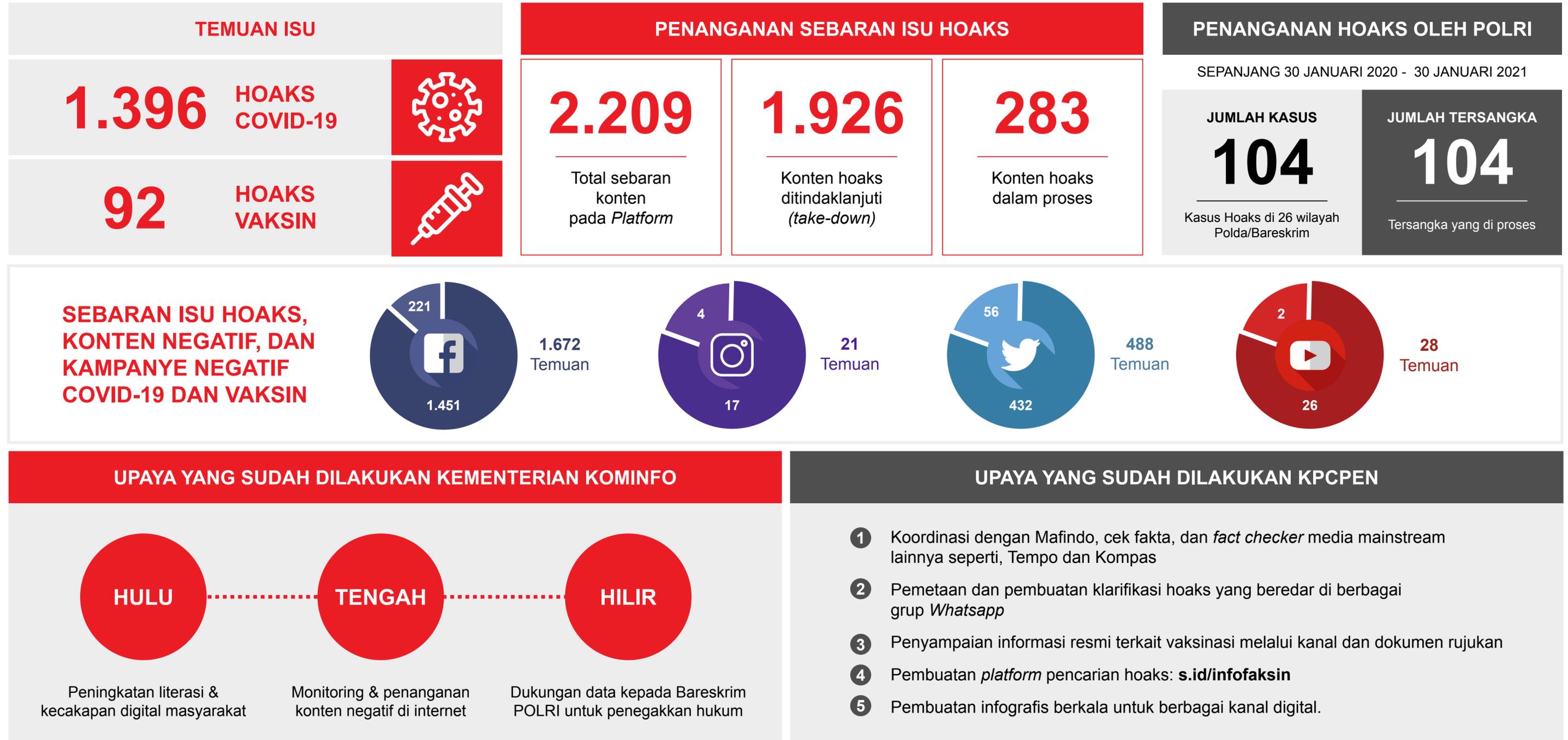
STATISTIK PENANGANAN KONTEN INTERNET NEGATIF PADA MEDIA SOSIAL



Grafik 1.12: Statistik Penanganan Konten Internet Negatif pada Media Sosial

Sumber: Ditjen APTIKA

PENANGANAN HOAKS TERKAIT COVID-19 DAN VAKSIN



Grafik 1.13: Rangkuman Penanganan Hoaks Terkait COVID-19 dan Vaksin 2020

Kenapa Data Pribadi Harus Dilindungi?

- ✓ Data Pribadi adalah aset/komoditas bernilai tinggi di era big data dan ekonomi digital
- ✓ Bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang telah diamanatkan oleh negara melalui UUD 1945
- ✓ Banyak kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi, khususnya di sektor *Digital Financial Technology*

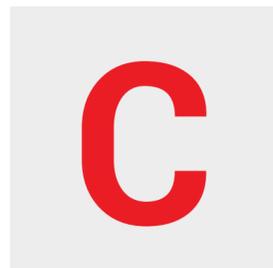
Tujuannya adalah

- ✓ Menjamin hak warga negara atas perlindungan data pribadi
- ✓ Menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi
- ✓ Menjamin pengakuan dan penghormatan atas perlindungan data pribadi

LINDUNGI IDENTITAS DIGITAL, RUU PELINDUNGAN DATA PRIBADI (PDP)

Konsep perlindungan data pribadi mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah akan membagi, membatasi atau bertukar data pribadi. Pemerintah perlu hadir untuk menjamin perlindungan data pribadi dalam sebuah regulasi.

RUU PDP diharapkan dapat menjadi suatu regulasi yang kuat dan komprehensif dalam mengatur data pribadi, baik di dalam negeri maupun lintas batas negara. Naskah RUU tentang PDP telah secara resmi diserahkan Presiden Joko Widodo kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI melalui Surat Presiden No. R-05/Pres/01/2020 tanggal 24 Januari 2020.



KOMUNIKASI PUBLIK YANG EFEKTIF



Gambar 1.6: Silaturahmi Virtual Menteri Kominfo Ramadan 2020

Dalam rangka percepatan diseminasi informasi publik dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo bertindak sebagai dirigen humas pemerintah (Government Public Relation) dalam rangka penyebaran informasi publik program-program pemerintah.

FOKUS INFORMASI PUBLIK KOMINFO TERKAIT PROGRAM PEMERINTAH DAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL SEPANJANG 2020:

- Pilkada Serentak 2020
- Penanganan Pandemi COVID-19
- Pencegahan Stunting/Kerdil
- Pemulihan Ekonomi Nasional
- Wawasan Kebangsaan/
Pendidikan Karakter Pancasila
- Ekonomi Digital
- Gerakan Indonesia Bersih



Jangkauan Informasi Program Prioritas
Pemerintah Tahun 2020

269.450.761

PERCEPATAN DISEMINASI INFORMASI PROGRAM PRIORITAS PEMERINTAH

Demi menunjang kecepatan penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah, Kementerian Kominfo memiliki tugas untuk membuat narasi tunggal yang kemudian disebarluaskan ke publik oleh instansi-instansi pemerintah melalui beragam saluran komunikasi yang mereka miliki.



Gambar 1.7: Webinar Vaksin: Tak Kenal Maka Tak Kebal - Forum Sosialisasi Penyuluh Informasi Publik (PIP)



PENYAMPAI PESAN PEMERINTAH HINGGA WILAYAH TERDEPAN, TERLUAR, DAN TERTINGGAL (3T)

Sepanjang tahun 2020, Kementerian Kominfo menjadi orkestrator untuk komunikasi publik lintas Kementerian/Lembaga. Selain diseminasi informasi program prioritas pemerintah, isu penanganan COVID-19 seperti vaksinasi dan pemulihan ekonomi juga menjadi fokus komunikasi publik Kementerian Kominfo.

Kesemuanya disebarkan melalui berbagai kanal, baik digital maupun non-digital ke seluruh pelosok Tanah Air dan juga wilayah terdepan terluar, tertinggal (3T). Kementerian Kominfo juga telah membangun

jaringan komunikasi akar rumput melalui Penyampai Informasi Publik (PIP) di 500 kecamatan prioritas meliputi daerah 3T.

Kini, Kementerian Kominfo sedang dalam proses metamorfosis menjadi kementerian yang fokus kepada bidang telekomunikasi dan digital. Kementerian Kominfo tetap akan menjalankan komunikasi publik namun dengan fokus yang bergeser kepada peran mengorkestrasikan dan menyusun agenda *setting*.

KEMENTERIAN KOMINFO SEBAGAI KOORDINATOR PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK



Mengkoordinasikan perencanaan, penyiaran, dan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.



Melakukan kajian terhadap data dan informasi yang disampaikan kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, melakukan media monitoring dan menganalisis konten media terkait dengan kebijakan dan program pemerintah.

D

PERAN STRATEGIS KEMENTERIAN KOMINFO DALAM PENANGANAN COVID-19 PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL (PEN)

*Lindungi diri,
Lindungi Negeri,
Akhir Pandemi.*

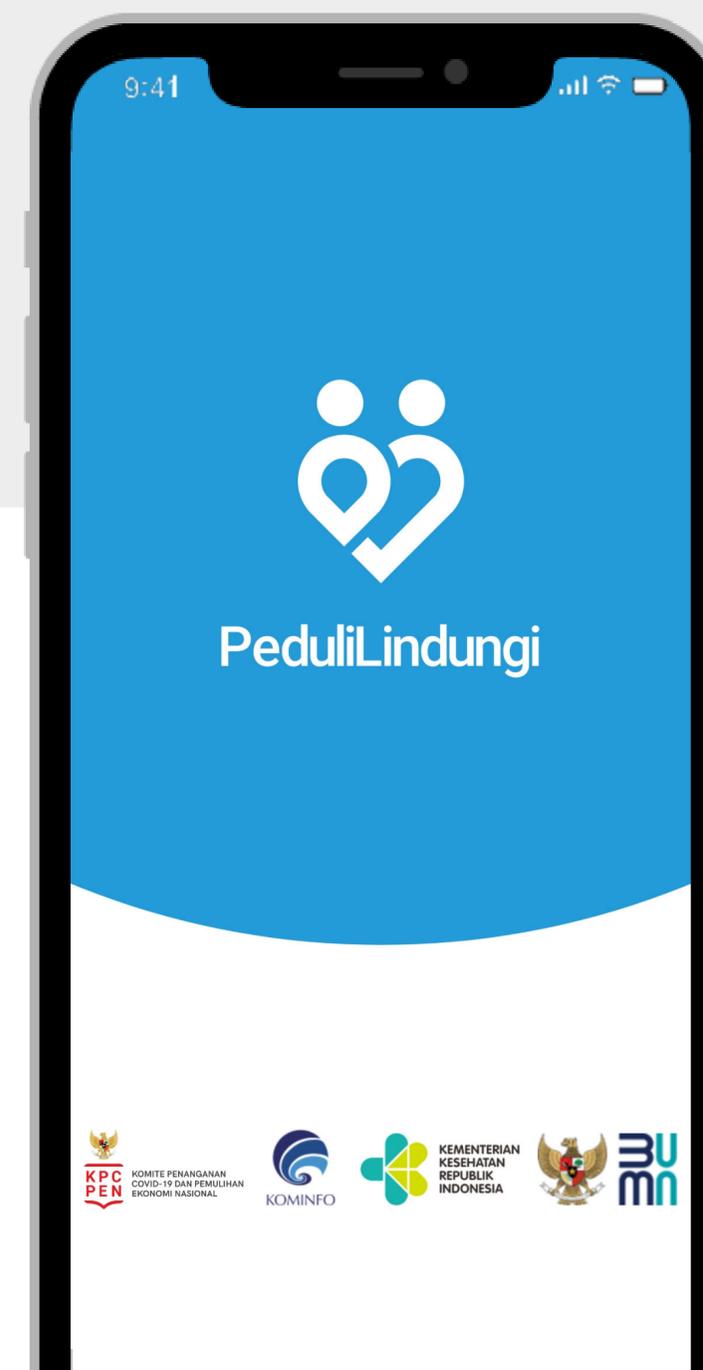


MENGHADIRKAN PLATFORM DIGITAL PENANGANAN COVID-19

Sepanjang 2020 hingga saat ini, guna mendukung upaya bersama percepatan penanganan pandemi COVID-19, Kementerian Kominfo melakukan pengembangan berbagai *platform* teknologi, termasuk aplikasi PeduliLindungi, serta Sistem Satu Data Vaksinasi.

APLIKASI PEDULILINDUNGI PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	CHATBOT COVID19.GO.ID	SISTEM SATU DATA VAKSINASI
<p>Aplikasi untuk pencegahan sekaligus <i>alert-system</i> guna menghentikan penyebaran COVID-19, Kolaborasi antara PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk., Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Kominfo.</p>	<p><i>Chatbot</i> Covid19.go.id merupakan kanal informasi yang dapat diakses masyarakat dengan mudah untuk sebaran kasus dan informasi dasar mengenai COVID-19.</p>	<p>Melengkapi <i>platform</i> PeduliLindungi yang juga digunakan untuk melakukan registrasi ulang penerima vaksinasi, Kementerian Kominfo menyediakan kanal chatbot WhatsApp melalui nomor 0811 1050 0567 atau tautan http://bit.ly/vaksincovidri</p>
<p>FITUR UTAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pelacakan Penyebaran Virus • Informasi Zonasi • Notifikasi Keramaian • Social Media Feedwall • Diari Saya • Registrasi & Sertifikasi Vaksin COVID-19 <p>TOTAL PENGGUNA 4.656.831</p> <p><small>*Sumber: Ditjen PPI per 15 September</small></p>	<p>TOTAL PENGGUNA 2.728.306 pengguna</p> <p>Bersama Kementeran BUMN, Kementerian Kominfo memfasilitasi SMS blast harian oleh operator seluler untuk diseminasi informasi terkait COVID-19.</p> <p>TOTAL SMS TERKIRIM 66.947.278 miliar SMS*</p> <p><small>*Sumber: Ditjen PPI per 15 September</small></p>	<p>Pengembangan kanal ini dilakukan untuk mempermudah tenaga kesehatan (<i>nakes</i>) yang belum terinput datanya untuk melakukan registrasi di mana saja.</p>

Tabel 1.5: Platform Digital Kementerian Kominfo untuk Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19



Gambar 1.8: Aplikasi PeduliLindungi



Gambar 1.9: Layanan Penyediaan Akses Internet dari Kementerian Kominfo di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas Rakumpit

PENYEDIAAN AKSES INTERNET DI GARDA TERDEPAN

Guna penanganan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui BAKTI terus berkomitmen melakukan akselerasi penyediaan akses internet di fasilitas layanan kesehatan (fasyankes) di seluruh Indonesia, khususnya di daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).

Per 24 Desember 2020, Kementerian Kominfo menyediakan akses internet cepat di 3.126 titik fasyankes. Jumlah tersebut melengkapi total 13.011 fisik fasyankes di Indonesia untuk mempercepat penanganan COVID-19, termasuk program vaksinasi sampai pada pemanfaatan atau penerbitan sertifikat vaksinasi secara digital.

Tanpa akselerasi, penyediaan akses internet di fasyankes di Indonesia baru selesai pada 2027. Pekerjaan yang harusnya membutuhkan waktu tujuh tahun bisa selesai dalam waktu satu kuartal.

KONTRIBUSI AKTIF KOMUNIKASI PUBLIK DALAM PENANGANAN COVID-19 DAN PEN

Terdapat dua jalur komunikasi publik terkait COVID-19, pertama komunikasi publik yang berkaitan dengan kesehatan dan pandemi yang dilakukan oleh Satgas COVID-19 dan Kementerian Kesehatan, dan kedua berkaitan dengan PEN.

Untuk PEN, Kementerian Kominfo membantu dan memperkuat melalui komunikasi publik. Hal tersebut tergambar dari keseluruhan potret dan proyeksi pembiayaan terhadap komunikasi publik pemerintah.

Dengan pengelolaan komunikasi publik terpusat, masyarakat tidak lagi bingung oleh informasi dan pernyataan yang simpang siur dari pihak-pihak yang tidak memiliki otoritas atau keahlian pada bidangnya.

LIMA JURU BICARA (JUBIR) VAKSIN COVID-19 DI INDONESIA



WIKU ADISASMITO

Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19



REISA BROTO ASMORO

Jubir dari Satgas Penanganan Covid-19



BAMBANG HERIYANTO

Jubir PT Biofarma



SITI NADIA TARMIZI

Jubir Kementerian Kesehatan & Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes



LUCIA RIZKA ANDALUSIA

Jubir dari BPOM

BAB II

RAPOR BIRU KEMENTERIAN KOMINFO

A

Realisasi Anggaran
Kementerian
Kominfo

B

Realisasi Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP)
Sektor Kominfo

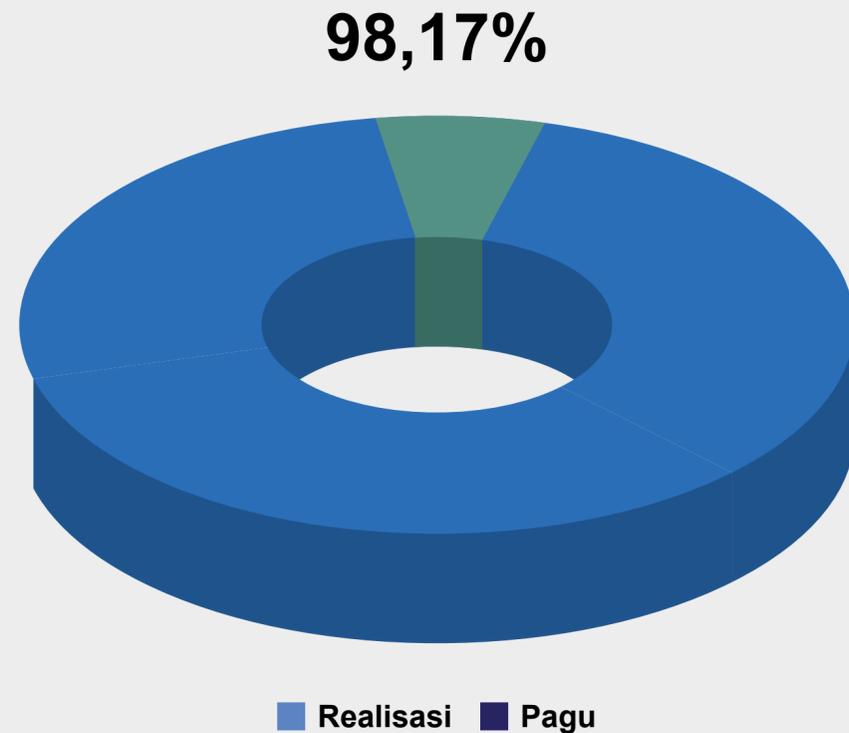


Gambar 2.1: Rapat Kerja Kementerian Kominfo bersama Komisi I DPR RI

A

REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KOMINFO TAHUN 2020

Realisasi anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika pada TA 2020 adalah sebesar Rp 7.945.022.266.785 atau 98,17% dari Pagu DIPA sebesar Rp 8.093.071.658.000.



Grafik 2.1: Realisasi Anggaran Kementerian Kominfo Tahun 2020

Pagu Anggaran (Rp)

8.093.071.658.000

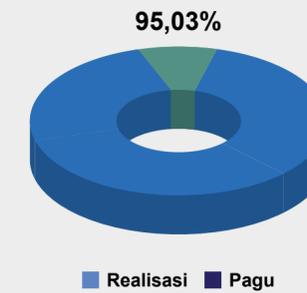
Total pagu anggaran per 31 Desember 2020

Realisasi Anggaran (Rp)

7.945.022.266.785

Total pagu anggaran per 31 Desember 2020

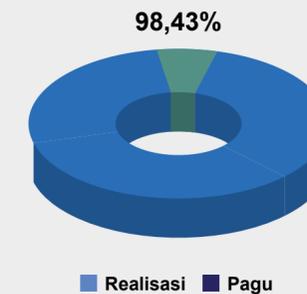
BELANJA PEGAWAI



Alokasi pagu anggaran untuk belanja pegawai per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 507.585.826.000

Total realisasi anggaran untuk belanja pegawai per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 482.346.101.685

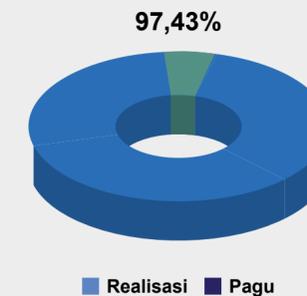
BELANJA BARANG



Alokasi pagu anggaran untuk belanja barang per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 7.202.699.923.000

Total realisasi anggaran untuk belanja barang per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 7.089.738.958.299

BELANJA MODAL



Alokasi pagu anggaran untuk belanja modal per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 382.785.909.000

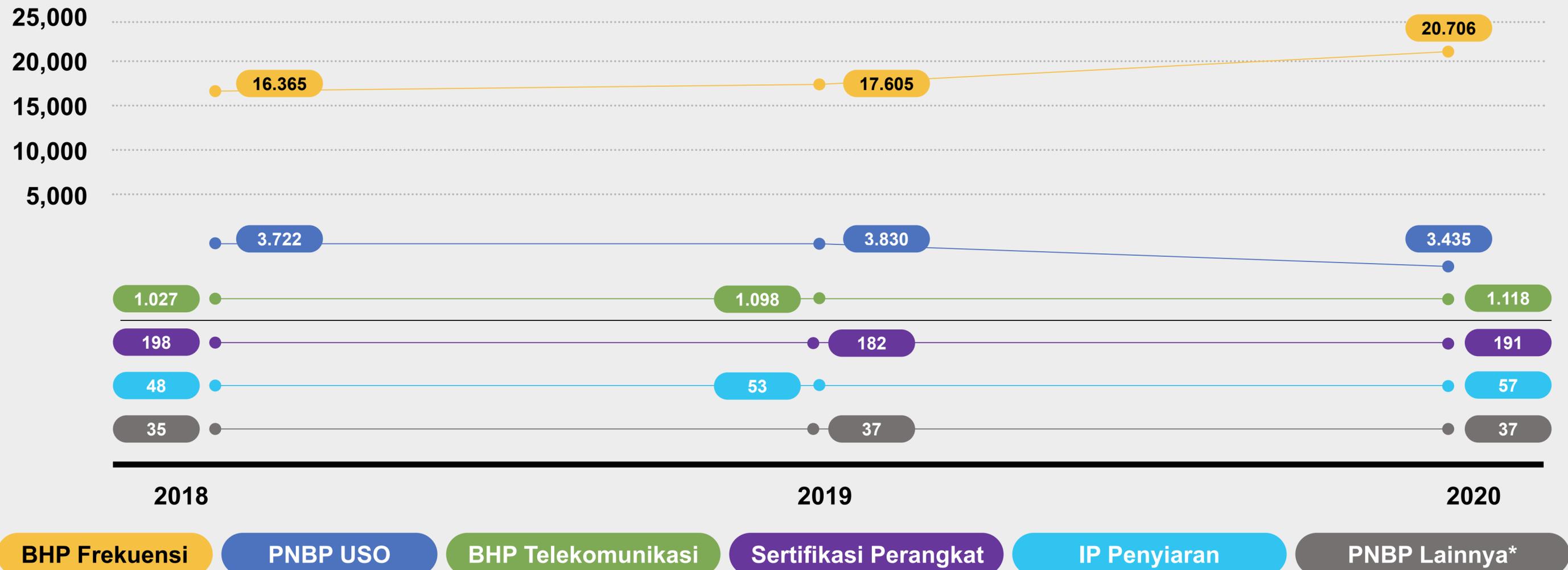
Total realisasi anggaran untuk belanja modal per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 372.937.206.801

Grafik 2.2: Alokasi Pagu Anggaran Belanja Kementerian Kominfo 2020

B

REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) SEKTOR KEMENTERIAN KOMINFO TAHUN 2020

Realisasi anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika pada TA 2020 adalah sebesar Rp 7.945.022.266.785 atau 98,17% dari Pagu DIPA sebesar Rp 8.093.071.658.000.



Grafik 2.3: Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kementerian Kominfo Tahun 2020

BAB III

LANGKAH STRATEGIS 2021 PERCEPATAN TRANSFORMASI DIGITAL INDONESIA

A

Akselerasi
Transformasi
Digital Nasional

B

Menyiapkan
Talenta
Digital

C

Langkah Strategis
Penanganan Pandemi
COVID-19

5 LANGKAH AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL

1

Percepatan perluasan akses,
peningkatan infrastruktur digital,
dan penyediaan layanan internet.

2

Persiapkan *roadmap*
transformasi digital di sektor-
sektor strategis.

3

Integrasi Pusat Data Nasional.

4

Kebutuhan SDM Talenta Digital.

5

Siapkan regulasi, skema
pendanaan, dan pembiayaan.

Grafik 3.1: Lima Langkah Akselerasi Transformasi Digital



Gambar 3.1: Menteri Kominfo dalam Konferensi Pers Kedatangan Vaksin COVID-19

A

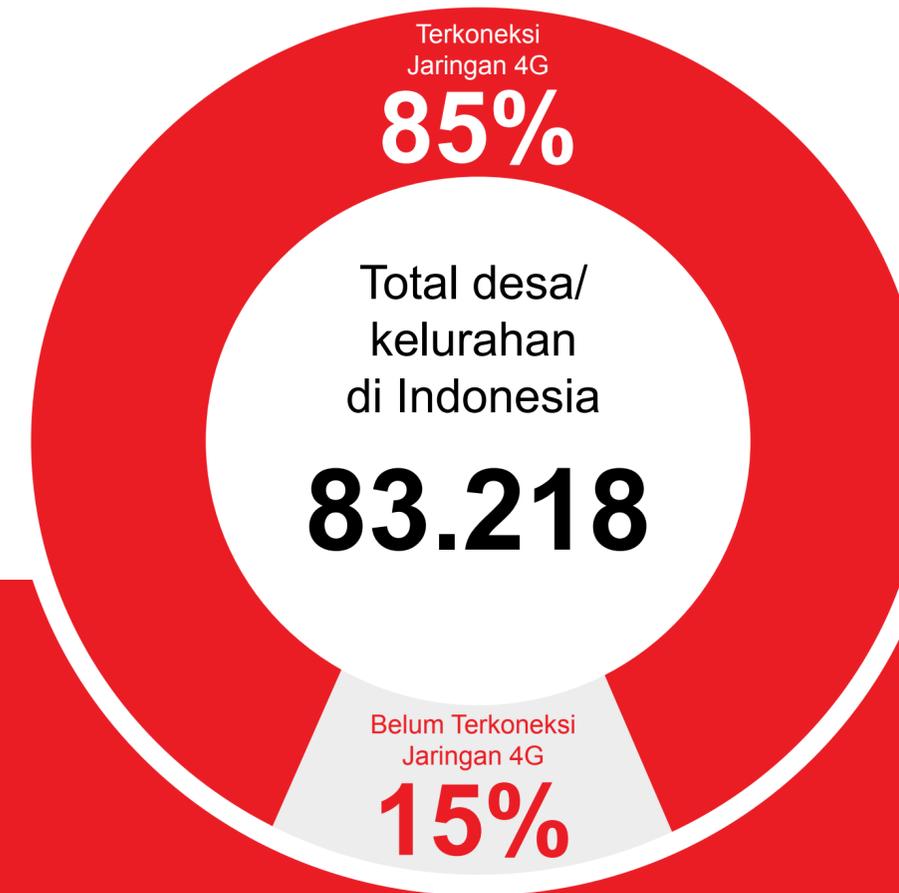
AKSELERASI TRANSFORMASI DIGITAL NASIONAL

Prioritas kerja Kementerian Kominfo telah sejalan dengan garis besar prioritas pembangunan nasional yang selama ini mendorong pemerataan infrastruktur fisik guna menunjang pertumbuhan dan kebangkitan ekonomi bangsa. Yang dimaksud dengan infrastruktur fisik yang terus diupayakan pemerataannya adalah infrastruktur telekomunikasi yang dapat meningkatkan konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan, demi menghubungkan yang belum terhubung tanpa meninggalkan satu orang pun.

FOKUS PEMBANGUNAN BTS DAN AKSES INTERNET DI WILAYAH 3T

Kementerian Kominfo, sebagai akselerator, fasilitator, dan regulator transformasi digital, telah menyiapkan berbagai program, termasuk akses internet yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Sehingga pada 2021 akan dimulai pembangunan di berbagai daerah yang selama ini dianggap *blank spot*.

Pembangunan BTS demi menyediakan akses internet yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia, khususnya di 3T akan dilakukan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo sementara daerah di luar wilayah 3T diserahkan kepada operator seluler. Tahun 2021, Kementerian Kominfo melalui BAKTI berencana membangun 4.200 BTS. Pembangunan BTS di 12.548 desa/kelurahan ini ditargetkan rampung pada akhir 2022.



12.548 DESA BELUM TERKONEKSI INTERNET



Grafik 3.2: Data Perkembangan Pembangunan BTS dan Akses Internet 2020

Sumber: Diolah dari Dukcapil 2016, BIG 2016, BPN 2015, Data Site & Coverage Operator Seluler Q3 2019

Semakin Terkoneksi Untuk Melayani

PERSIAPAN SATRIA MENGANGKASA



Grafik 3.3: Linimasa Proyek SATRIA Tahun 2020-2023

Setidaknya terdapat 150.000 titik layanan publik di berbagai wilayah Indonesia yang membutuhkan konektivitas internet yang memadai. Guna memenuhi kebutuhan ini, Pemerintah Indonesia tengah mengupayakan penyediaan satelit melalui Proyek KPBU Satelit Multifungsi Republik Indonesia (SATRIA) yang ditargetkan beroperasi pada kuartal keempat 2023 mendatang. Dengan menggunakan teknologi *High-Throughput Satellite (HTS)*, satelit Ka-Band dengan kapasitas sebesar 150 Gbps ini diharapkan dapat menjangkau wilayah *blankspot* di wilayah-wilayah 3T.

150.000 TITIK FASILITAS PUBLIK YANG AKAN DIJANGKAU SATELIT SATRIA-1



93.900

Sekolah/
Pesantren



47.900

Kantor Pemerintah
Daerah



3.700

Fasilitas
Kesehatan



4.500

Layanan publik
lainnya

Grafik 3.4: Sebaran Jangkauan Satelit SATRIA-1 di Fasilitas Publik

Dengan total kapasitas satelit sebesar 150 Gbps, masing-masing titik fasilitas layanan publik mendapatkan kapasitas sebesar 1Mbps.

TURN DIGITAL ON: DIGITAL TELEVISION (DTV)

Kementerian Kominfo menargetkan migrasi siaran TV analog ke TV digital atau *Analog Switch Off (ASO)* selesai dalam dua tahun. Untuk merealisasikan target tersebut, Kementerian Kominfo melakukan pembaruan sistem pemancar digital TVRI di 34 lokasi untuk mendorong proses digitalisasi televisi.

Dengan ditetapkannya untuk UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka digitalisasi TV berlaku mulai 20 November 2022. ASO menjadi kewajiban. Undang-Undang Cipta Kerja juga sudah membuka ruang untuk mempermudah dan membantu agar *capital expenditure* lebih efisien melalui biaya modal yang akan disediakan untuk menyiapkan infrastruktur televisi digital.

Dasar aturan persiapan dan implementasi digitalisasi televisi:

- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP NSPK).
- ✓ Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (PP Postelsiar).
- ✓ 5 (lima) Rancangan Peraturan Menteri (RPM) sektor Postelsiar.

Dengan berlakunya peraturan mengenai migrasi siaran ASO ke digital, maka masyarakat dapat merasakan hadirnya manajemen dan manfaat spektrum frekuensi yang lebih efisien, serta menikmati siaran televisi yang semakin **bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya.**



Gambar 3.2: BTS BAKTI

MENUJU 5G

Pembangunan TIK menjadi prasyarat penting terwujudnya transformasi digital di Indonesia. Hal ini menjadi peran dan tanggung jawab Kementerian Kominfo dalam menyediakan infrastruktur sekaligus akses layanan TIK yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah Indonesia dengan kualitas layanan yang baik dan terjangkau oleh masyarakat.

Selain pembangunan infrastruktur TIK, transformasi digital nasional juga perlu untuk didukung oleh adopsi pengembangan teknologi termutakhir, salah satunya adalah jaringan generasi kelima atau 5G. Jaringan tersebut akan menjadi *game changer* atau pengubah permainan dengan dampak yang luas pada konektivitas Indonesia. Bahkan menjadi tulang punggung transformasi digital dan pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Saat ini, Kementerian Kominfo sedang merumuskan Peta Jalan (*Roadmap*) Kebijakan Implementasi 5G di Indonesia untuk menghasilkan

strategi kebijakan implementasi teknologi 5G yang komprehensif. Untuk membuat *Roadmap* 5G tersebut, Kementerian Kominfo telah membentuk Gugus Tugas (*Task Force*) 5G.

Diharapkan mulai tahun 2021, layanan 5G telah mulai dapat dikembangkan dan dinikmati oleh masyarakat di sejumlah lokasi tertentu. Dengan memanfaatkan fitur *Dynamic Spectrum Sharing* (DSS) dan *Carrier Aggregation* (CA), pita frekuensi seluler eksisting yang digunakan untuk menyediakan layanan 4G juga dapat dioptimalkan untuk membawa trafik layanan 5G kepada pelanggan masing-masing operator seluler. Yang dimaksud sebagai pita frekuensi seluler eksisting adalah yang saat ini teridentifikasi di dalam ekosistem perangkat yang mendukung untuk layanan 5G, antara lain mencakup pita frekuensi radio 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2,1 GHz, dan 2,3 GHz.

ROADMAP 5G

Jaringan 4G merupakan fondasi dasar untuk mengembangkan jaringan 5G ke depannya. Tujuan utama kerja keras menutup *blankspot* 4G adalah untuk memastikan tersedianya jaringan 4G yang memadai kapasitasnya, merata secara cakupan sehingga mudah diakses dimanapun, dan harganya terjangkau. Secara paralel, Kementerian Kominfo saat ini sedang merumuskan Peta Jalan (*Roadmap*) Kebijakan Implementasi 5G di Indonesia.

Perumusan *roadmap* 5G tersebut bertujuan untuk menghasilkan strategi kebijakan implementasi teknologi 5G yang holistik dan jelas tahapannya. *Roadmap* 5G diharapkan pada akhirnya dapat mendukung transformasi digital yang dicantumkan di dalam Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024. Untuk membuat *roadmap* 5G tersebut, Kementerian Kominfo telah membentuk Gugus Tugas (*Task Force*) 5G. Target keluaran (*output*) dari *Task Force* 5G yang akan difinalisasi pada akhir tahun 2021 adalah rekomendasi kebijakan 5G yang komprehensif dengan rencana kerja yang detail mencakup seluruh satuan kerja di Kementerian Kominfo.

Lima kelompok kerja *Task Force* 5G dengan fokus pembahasan mencakup 5 (lima) aspek:



Spektrum Frekuensi Radio



Model Bisnis



Infrastruktur



Perangkat & Ekosistem



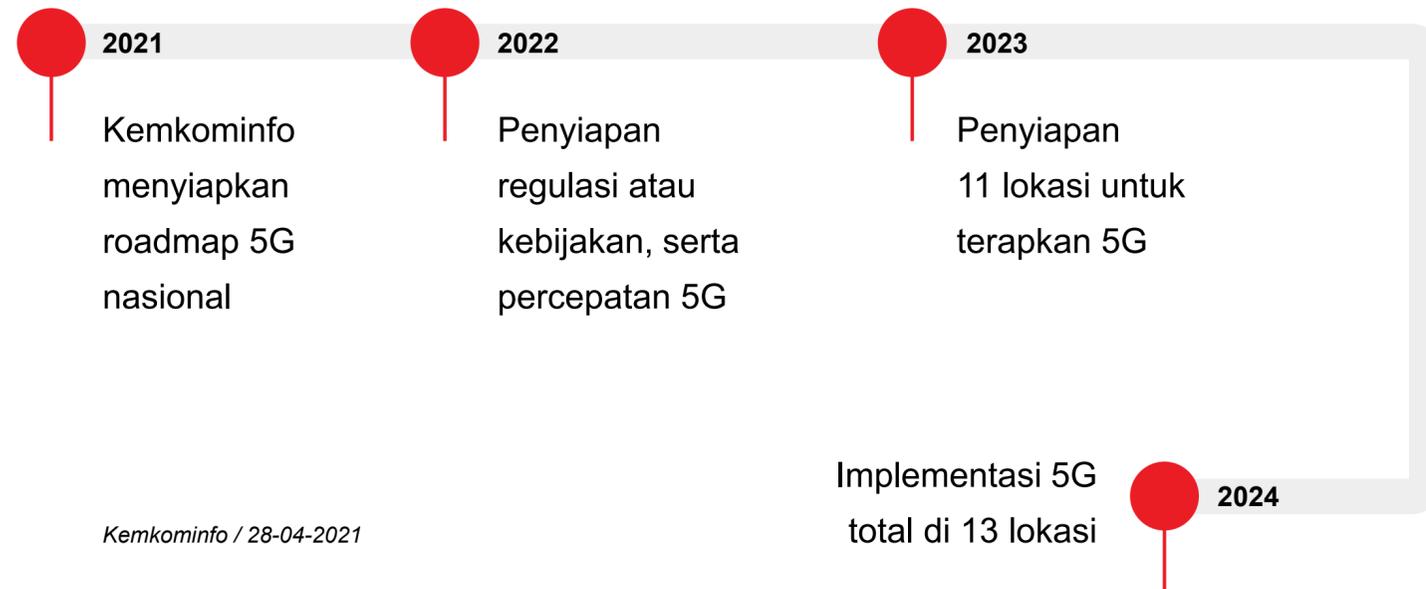
Regulasi



Gambar 3.3: Menteri Kominfo dalam Konferensi Pers “Isu Sektor Kominfo di RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta aturan pelaksanaannya, maka dukungan regulasi terhadap implementasi 5G di Indonesia terus dilakukan. Substansi kebijakan *spectrum sharing* diperkuat dengan adanya fleksibilitas di dalam UU Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya melalui skema kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio.

Selain itu, kebijakan *sharing* infrastruktur pasif dan jaringan aktif diperkuat pengaturannya di dalam UU Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya. Pemutakhiran regulasi tersebut diharapkan semakin mendorong efisiensi dan percepatan implementasi 5G di Indonesia dengan kualitas yang memadai.



Kemkominfo / 28-04-2021

Grafik 3.5: Roadmap Menuju 5G

Menuju 5G

ROADMAP 5G

Kementerian Kominfo akan mempercepat rencana penggelaran jaringan 5G di Indonesia secara bertahap dan terbatas di **13 wilayah**.

- Ibu Kota baru/Ibu Kota Negara (IKN)
- 6 Ibu Kota Provinsi di Pulau Jawa
- 5 destinasi wisata super prioritas
- 1 industri manufaktur

ditargetkan

selesai 2024

MEWUJUDKAN SATU DATA INDONESIA



Gambar 3.4: Menteri Kominfo Meninjau Lokasi Lahan Pembangunan *Data Center*, Cikarang



Gambar 3.5: Lokasi Pembangunan *Data Center*, Cikarang

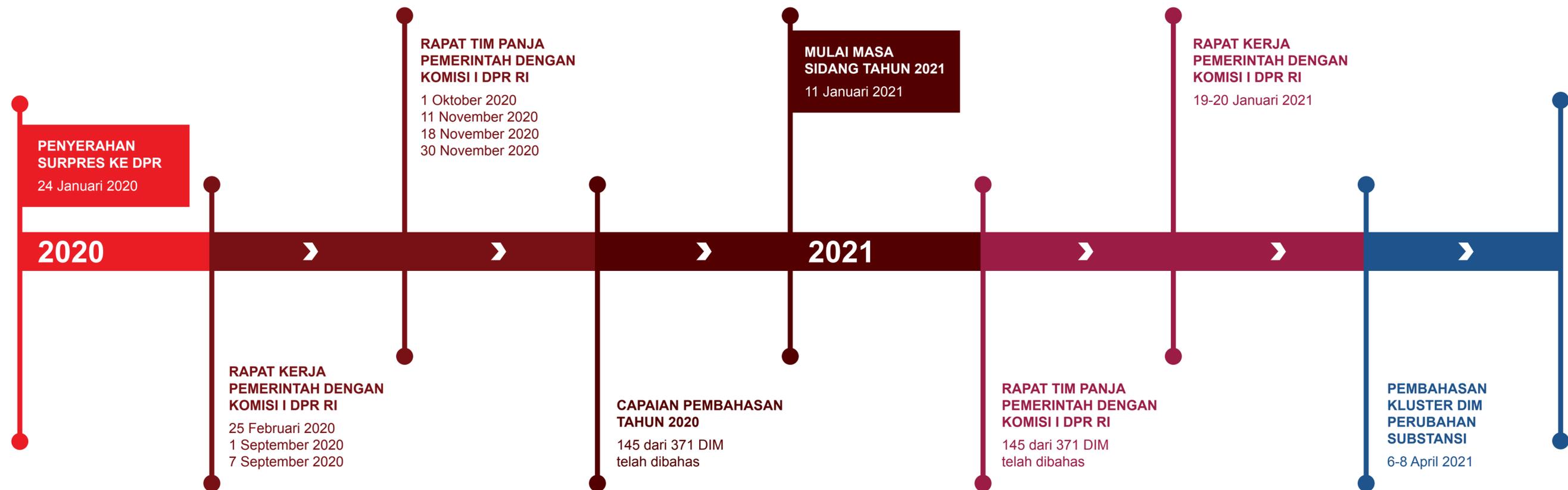
Percepatan integrasi Pusat Data Nasional (PDN) juga menjadi langkah nyata dalam mendukung akselerasi Agenda Percepatan Transformasi Digital Nasional. Dalam hal ini, Kementerian Kominfo bertugas untuk membangun dan mengonsolidasikan pusat data atau ruang *server* yang dikelola oleh kementerian/ Lembaga di fasilitas tersebut.

Pada 2021, persiapan pembangunan PDN segera dilakukan. Mulai dari penyiapan administrasi lelang konstruksi, dokumentasi perencanaan pembangunan, formulasi kelembagaan, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait. Pembangunan PDN Jabodetabek dijadwalkan untuk dimulai pada Oktober 2021 dan ditargetkan mulai beroperasi penuh di tahun 2024.

Selain menyiapkan pembangunan PDN di Jabodetabek, pada 2021, Kementerian Kominfo juga menyiapkan lahan untuk PDN kedua dengan alternatif lokasi di Pulau Batam, Kepulauan Riau.

RUU PELINDUNGAN DATA PRIBADI (PDP)

RUU PDP memberikan landasan hukum bagi Indonesia untuk perlindungan terhadap data pribadi masyarakat, sekaligus menjamin keamanan dan kedaulatan secara nasional.



Grafik 3.6: Linimasa RUU PDP Tahun 2020-2021

B

MENYIAPKAN TALENTA DIGITAL

Kedaulatan dan kemandirian digital bangsa Indonesia menjadi salah satu fokus arahan Bapak Presiden Joko Widodo yang mengajak seluruh elemen bangsa memanfaatkan konektivitas digital agar dapat menghubungkan Indonesia dengan pola pikir, kesempatan bisnis global, dan masa depan baru. Penyiapan talenta digital yang cakap dalam menghadapi era disrupsi digital, menjadi salah satu penggerak utama pemanfaatan konektivitas digital yang produktif sebagai perwujudan agenda transformasi digital Indonesia.



Gambar 3.6: Kegiatan Pelatihan Intensif DTS 2020 (3)

DIGITAL TALENT SCHOLARSHIP (DTS) TAHUN 2021

Program DTS 2021 dibagi menjadi delapan akademi:

- *Fresh Graduate Academy (FGA)*
- *Thematic Academy (TA)*
- *Professional Academy (ProA)*
- *Government Transformation Academy (GTA)*
- *Digital Entrepreneurship Academy (DEA)*
- *Digital Leadership Academy (DLA)*
- *Talent Scouting Academy (TSA)*

Program Digital Talent Scholarship (DTS) dirancang sebagai upaya Kementerian Kominfo untuk memberikan pelatihan kecakapan digital di level menengah (*intermediate*) bagi masyarakat Indonesia. DTS diperuntukkan bagi angkatan kerja muda, pekerja level teknis maupun profesional yang ingin melakukan *reskilling* dan/ atau *upskilling* di bidang digital, seperti *big data*, *artificial intelligence*, *machine learning*, *cloud computing*, *cybersecurity*, ataupun pemanfaatan kemajuan teknologi digital lainnya.

Program yang turut bekerja sama dengan 93 universitas dan politeknik di 34 provinsi ini diharapkan dapat memberikan kebermanfaatan kepada angkatan kerja muda dan masyarakat umum.



Gambar 3.7: Kegiatan Pelatihan Intensif DTS 2020 (4)

DIGITAL TALENT SCHOLARSHIP (DTS) TAHUN 2021

Pada 2021, Kementerian Kominfo menargetkan sebanyak 100.000 lulusan baru (*fresh graduate*), masyarakat umum, dan pegawai negara meningkatkan kompetensi mereka melalui pelatihan dan sertifikasi.

Berikut secara rinci jumlah peserta dalam program DTS yang dilaksanakan pada 2021:

1. *Fresh Graduate Academy (FGA)* Target: 10.000 orang
2. *Profesional Academy (ProA)* Target: 24.000 orang
3. *Thematic Academy (TA)* Target: 10.000 orang
4. *Government Transformation Academy (GTA)* Target: 18.500 orang
5. *Talent Scouting Academy (TSA)* Target: 2.736 orang
6. *Digital Entrepreneurship Academy (DEA)* Target: 22.000 orang
7. *Vocational School Graduate Academy (VSGA)* Target: 12.764 orang



Gambar 3.8: Kegiatan Pelatihan Intensif DTS 2020 (5)

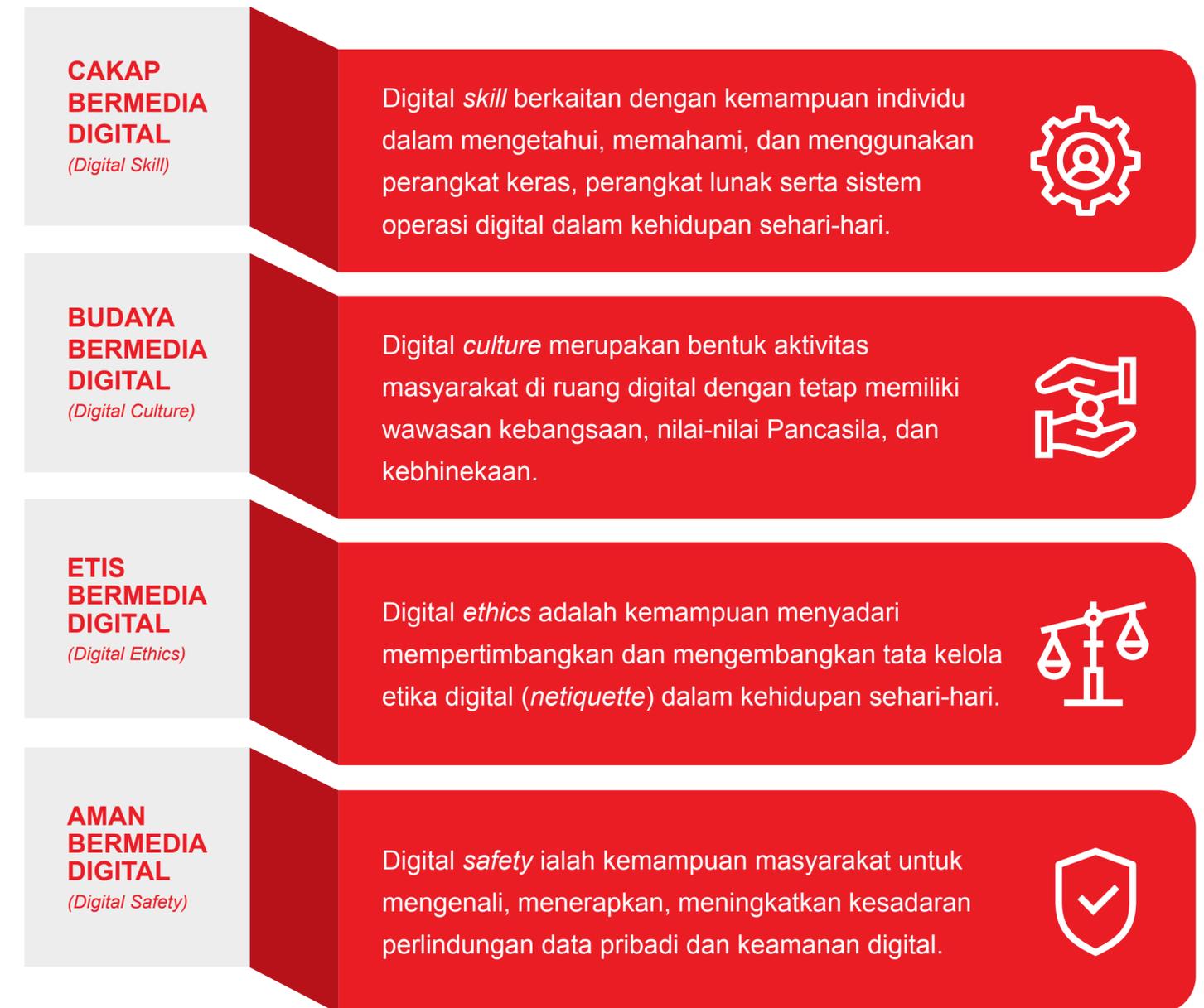
GERAK CEPAT LITERASI DIGITAL

Guna memastikan agar kemajuan teknologi digital dapat dimanfaatkan secara produktif, sehat, dan aman, maka masyarakat yang cakap serta terliterasi secara digital adalah suatu keharusan. Program Literasi Digital Nasional merupakan komitmen nyata Kementerian Kominfo untuk menumbuhkan kesadaran dan mengembangkan kecakapan digital di level dasar (*basic*) bagi masyarakat Indonesia. Program ini dilaksanakan melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi.

Program ini dilaksanakan dalam bentuk berbagai kelas pelatihan yang didasarkan pada modul dan kurikulum yang menasar empat pilar literasi digital, yaitu: *Digital Ethics*; *Digital Safety*; *Digital Skills*; dan *Digital Culture*. Kelas pelatihan tersebut terbuka secara luas dan gratis bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kementerian Kominfo menargetkan jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital pada 2021 sebanyak 12.653.750 orang. (Pada 2024, diharapkan sebanyak 50.000.000 masyarakat Indonesia telah terliterasi digital)

Empat pilar literasi untuk mengenalkan dan memberikan pemahaman mengenai perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK).



Grafik 3.7: Empat Pilar Literasi Teknologi Informasi dan Komunikasi

DIGITAL LEADERSHIP ACADEMY (DLA)



Gambar 3.9: Menteri Kominfo Membuka Grand Launching 4 Pilar Kurikulum & Modul Literasi Digital

“Program Digital Leadership Academy (DLA) diinisiasi untuk meningkatkan kapasitas pembuat kebijakan digital (*digital decision maker*) baik di sektor publik maupun privat.”

Johnny G. Plate

Dalam acara Grand Launching Gerakan Nasional Literasi Digital untuk 12,4 Juta Masyarakat (16/04/2021)

KEHADIRAN DLA BERANGKAT DARI ADANYA PERSOALAN BERIKUT:

- Transformasi digital merupakan tantangan baru.
- Tata kelola dalam *e-government* dan *e-business*.
- Percepatan perluasan akses internet dan peningkatan infrastruktur digital.
- Peningkatan kinerja dengan mempersiapkan pengembangan SDM di level pimpinan.
- Mewujudkan Pusat Data Nasional sebagai infrastruktur untuk mempercepat integrasi data menuju Satu Data Indonesia.
- Pembuatan kebijakan dan atau legislasi untuk mendukung transformasi digital dengan mengikuti perkembangan teknologi

DENGAN DEMIKIAN, DLA BERTUJUAN UNTUK:

Mengubah pola pikir dan mendorong adanya penyamaan persepsi dan pemahaman yang sama sehingga mampu berkolaborasi secara makro untuk mewujudkan sinergitas antarsektor

Menginisiasi dan mendorong perubahan menuju transformasi digital.

Merumuskan kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri digital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Mendorong peningkatan daya saing ekonomi digital Indonesia.

Meningkatkan kompetensi para pembuat kebijakan dalam menciptakan model bisnis baru dalam transformasi digital.

DIGITAL LEADERSHIP ACADEMY (DLA)

DLA mengajarkan berbagai kecakapan era digital, seperti *artificial intelligence, machine learning, cloud computing, cyber security, digital entrepreneurship, digital communication*, dan sebagainya.

Tiga tema besar yang dapat dipilih oleh para peserta dalam DLA:



Digital Transformation in Government: Innovating Public Policy & Service.



Digital Transformation in Government: Practicing Smart City.



Governance, dan Digital Transformation in Government: Digital Business.

OUTPUT YANG DIHARAPKAN DARI PROGRAM DLA BERUPA TERSUSUNNYA RANCANGAN *POLICY BRIEF* DAN RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN DARI MASING-MASING PESERTA.

DLA ditujukan bagi para pimpinan, baik di sektor publik maupun swasta. Pembelajaran dalam program DLA dilakukan secara *online* dan *onsite* di tiga kampus, yakni Harvard Kennedy School, National University of Singapore, dan Tsinghua University. Namun, kesempatan untuk *onsite learning* yang diperuntukkan bagi para peserta terpilih dengan nilai terbaik.

Tahun 2021, DLA tersedia bagi 300 pimpinan dari sektor publik dan swasta dengan komposisi 100 peserta per tema. Jumlah tersebut terdiri atas 50 peserta masing-masing dari sektor publik dan swasta.

Waktu pelaksanaan DLA 2021:

JULI 2021

enrolment

AGUSTUS 2021

commencing



LANGKAH STRATEGIS PENANGANAN PANDEMI COVID-19

Menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam upaya bersama melawan pandemi COVID-19.

1.

SISTEM INFORMASI SATU DATA (SISD) VAKSINASI COVID-19

SISD Vaksinasi COVID-19 merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber kementerian/ lembaga dan operator telekomunikasi untuk manajemen vaksinasi dari hulu ke hilir. Mulai dari tahap pendaftaran, distribusi pelaksanaan, hingga monitoring pelaksanaan vaksinasi.

Pengembangan SISD Vaksinasi COVID-19 juga menjadi *milestone* penting dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) dan pengembangan Pusat Data Nasional nantinya.

Cara Kerja		
APLIKASI	PENGEMBANG	KEGUNAAN
PeduliLindungi	<ul style="list-style-type: none">Kementerian KominfoKementerian BUMN	<ul style="list-style-type: none">Registrasi ulangPengeluaran sertifikat vaksin COVID-19
PrimaryCare	BPJS Kesehatan	Pencatatan dan pelaporan vaksinasi COVID-19
SMILE	Kementerian Kesehatan	Monitoring distribusi vaksin COVID-19

Dukungan Tambahan Kementerian Kominfo



Infrastruktur

Melalui BAKTI Kementerian Kominfo, telah dilakukan pengadaan akses internet di 3.126 titik fasyankes yang belum memiliki akses internet memadai dari total 13.011 titik fasyankes di Indonesia.

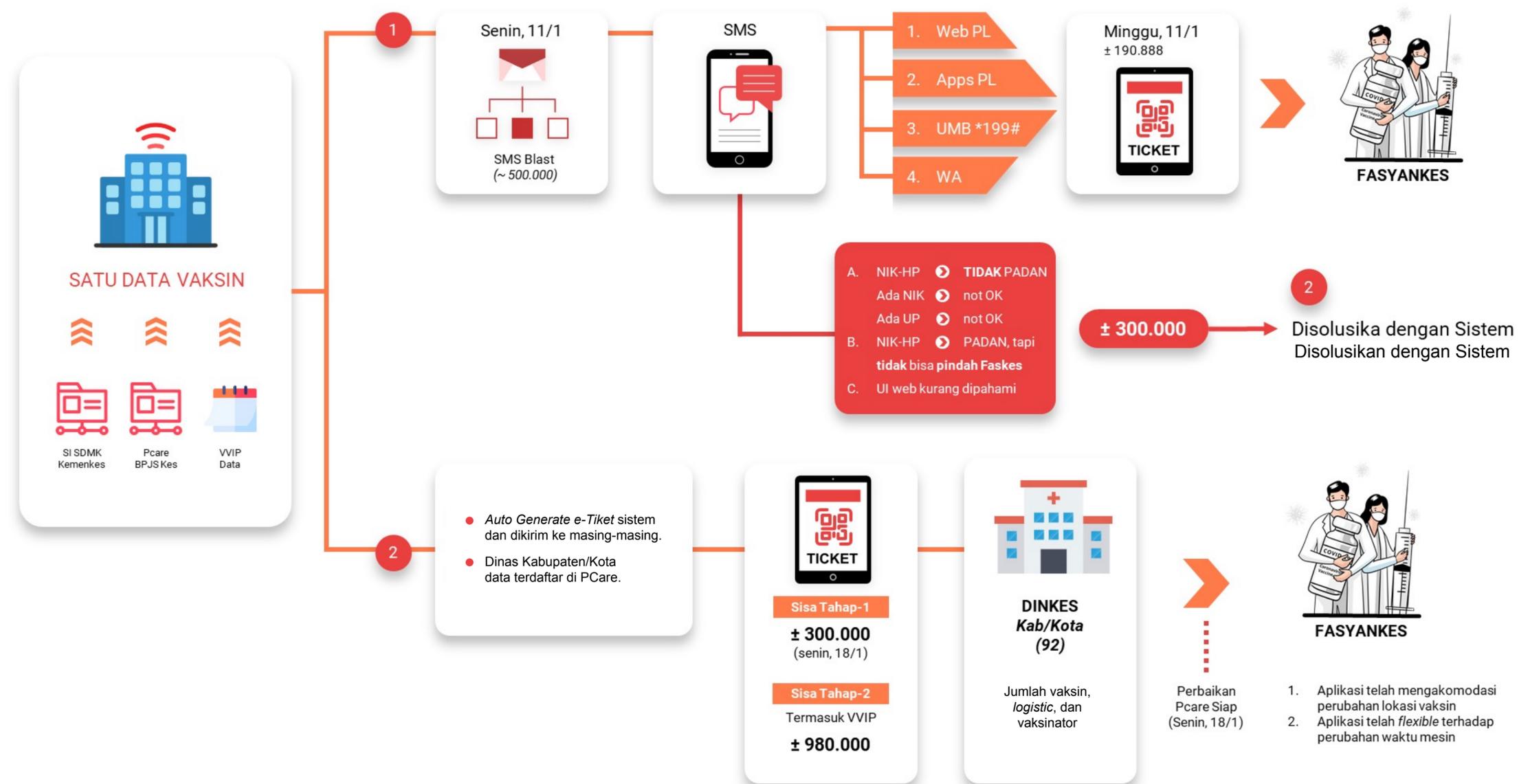


Regulasi

Mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan No. HK.03.01/MENKES/53/2021 dan Menteri Kominfo No.5 Tahun 2021 untuk menjadi payung hukum SISD Vaksinasi COVID-19.

Grafik 3.8: Sistem SISD Vaksinasi COVID-19 dan Peran Kementerian Kominfo

SISTEM INFORMASI SATU DATA (SISD) VAKSINASI COVID-19



Grafik 3.9: Improvisasi Registrasi SISD Vaksinasi COVID-19

2.

MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENANGANAN COVID-19 DAN PEN

Selama pandemi COVID-19 yang masih melanda sebagian wilayah Indonesia, peran Kementerian Kominfo sangat penting dalam memberikan pesan-pesan yang benar, dengan mempertimbangkan sisi kesehatan dan perekonomian secara bersamaan.

Melalui protokol komunikasi publik yang memberikan informasi penting dalam menyikapi pandemi COVID-19 di berbagai kanal informasi, Kementerian Kominfo bersama Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mendiseminasikan informasi seputar vaksin dan upaya-upaya pemerintah dalam melakukan pemulihan ekonomi nasional, dan juga bersama Satuan Tugas (Satgas) COVID-19 dalam memberikan edukasi mengenai penerapan protokol kesehatan 5M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.



ILM TV Nasional
24.920 Spot



**Dialog Interaktif
TV Nasional**
432 Spot



ILM/Ad-lips Radio
61.820 Spot



**Advertorial Media Cetak
Nasional & Daerah**
360 Spot



**Iklan & Kemitraan
Media Sosial**
648 Kegiatan



Media Luar Ruang
1.094 Spot



**Dialog Interaktif
di Radio Nasional**
2.113 Spot



LPP Lokal
15.337 Spot



Webinar
240 Kegiatan



**Media Relations
(FMB)**
96 Spot



ILM di Media Online
8.556



**Pertunjukan Seni Rakyat
(Online & Offline)**
350 Kegiatan

Grafik 3.10: Rencana Diseminasi Informasi Penting Terkait KPCPEN Tahun 2021

Sumber: Bahan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Kominfo (1 Februari 2021)



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Indonesia Terkoneksi: Semakin Digital, Semakin Maju

Jalan Medan Merdeka Barat No.9
Jakarta Pusat 10110
www.kominfo.go.id

- @kemenkominfo 
- @kemkominfo 
- @Kemkominfo 
- Kemkominfo TV 
- kemkominfo 

